

LOYALITAS RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN MENURUT
AL MAWARDI DAN HASAN AL-BANNA
(Studi Kasus Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Oleh:

SITI SAMSURIATI SIREGAR
NIM. 22.14.4.029/PM



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

LOYALITAS RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN MENURUT
AL MAWARDI DAN HASAN AL-BANNA
(Studi Kasus Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

SITI SAMSURIATI SIREGAR

NIM. 22.14.4.029



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)” telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), pada tanggal 06 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah pada jurusan Perbandingan Madzhab.

Medan, 06 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan,

Ketua,

Sekretaris,

Aripin Marpaung, MA
M.Ag
NIP. 196510051998031004

Dr. Ramadhan Syahmedi,
NIP. 197509182007101002

Anggota-Anggota

1. Irwan, M.Ag
NIP.197212152001121004

2. Aripin Marpaung, MA
NIP.196510051998031004

3. Dr. Dhiauddin Tanjung
Ag
NIP.197910202009011010

4. Dr. Ramadhan Syahmedi, M.
NIP.197509182007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UINS-SU Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Nama : Siti Samsuriati Siregar
NIM/Jurusan : 22144029/ Perbandingan Madzhab
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Gogar, 19 Nopember 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Jln. Samura Gang Madrasah, Kabanjahe. Tanah Karo
Judul Skripsi : Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al Mawardi dan Hasan Al-Banna (Studi Kasus Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kab.Labuhanbatu Selatan)
Pembimbing I : Drs Aripin Marpaung , M.A
Pembimbing II : Irwan, M.Ag

menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah murni karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 6 Nopember 2018

Siti Samsuriati Siregar
22.14.4.029

ABSTRAK

Loyalitas rakyat kepada pemimpin adalah suatu sikap atau perilaku yang berhubungan dengan dukungan atau kesetiaan rakyat kepada penguasa atau pemimpin dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Pentingnya pemimpin dalam Islam bukanlah untuk tujuan memperoleh kehormatan, melainkan untuk mencapai visi besar yaitu kemaslahatan umat. Sebuah gelar pemimpin umat bukanlah semudah membalikan telapak tangan atau melangkahkan kaki.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum loyalitas rakyat terhadap pemimpin. Menurut Imam Nawawi, tidak boleh melawan para penguasa dan wali semata-mata karena munculnya kezaliman dan kefasikan, selama mereka tidak merubah sedikitpun dari prinsip-prinsip Islam. Menurut al-Maududi, sekalipun penguasa (pemimpin) melakukan salat secara pribadi, maka mereka masih tetap berhak untuk disetia'i atau ditaati. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti masalah ini lebih dalam dengan metode yang ilmiah. Dalam hal ini, ulama yang akan peneliti jadikan sebagai objek bahasan adalah pandangan Al Mawardi dan Hasan Al Banna.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti masalah ini lebih dalam adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mencari karya-karya tulis Al Mawardi dan Hasan Al Banna yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah karya-karya itu didapatkan, peneliti akan melakukan pendekatan atas pendapat yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut. Setelah itu, penulis akan melihat bagaimana pendapat masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang ukum loyalitas rakyat kepada pemimpin.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Al-Mawardi, jika Imam telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak rakyat, rakyat wajib mematuhi dan mendukung kebijaksanaannya. Sedangkan menurut Hasan Al Banna taat terbagi pada beberapa klasifikasi yang diukur dari sejumlah tahapan pengkaderan seorang anggota. Sehingga, berbeda tingkatan pengkaderan seseorang, maka berbeda pula tuntutan untuk taat kepadanya. Masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi daripada yang disampaikan oleh Hasan Al Banna. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, yaitu: Sikap masyarakat yang memberikan pengecualian syarat untuk taat kepada pemimpin, yaitu selama pemimpin tersebut menurut mereka amanah dan adil maka pemimpin wajib untuk ditaati. Dan Al Mawardi juga tidak memberikan tingkatan dalam menaati pemimpin seperti yang disampaikan oleh Hasan Al Banna.

Wallāhu ta'ā'la a'lam!

Motto:

***"Bagaimana mungkin engkau
luar biasa, Sementara
kebiasaanmu belum luar biasa"¹***

¹Dikutip dari perkataan Imām Ibnu Ath-Thailah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘...	komatebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____ َ	Fathah	A	a
_____ ِ	Kasrah	I	i
_____ ُ	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
_____ َ... ِ ي	Fathah	Ai	a dan i
_____ َ... ِ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	ditulis	žukira
يَذْهَبُ	ditulis	yazhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. َ.... ى. ِ....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى. ِ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و. ُ....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قِيلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نُعِمُّ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu

الْقَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنَّ	ditulis	inna
أُمِرْتُ	ditulis	umirtu
أَكَلْ	ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn. -Wa <i>innallāhu</i> lahuwa khairur-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> . -Wa <i>auful-kaila wal-mizān</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-</i> <i>baitiman-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i> -Walillahi ‘alan-nāsi <i>hijjul-hijjul-</i> <i>baiti man-istata’a ilaihi sabīlā.</i>
---	---------	---

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur’ān. -Syahru Ramaḍanal-lazi unzila fīhil- Qur’ānu.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad ra’āhu bi al-uḥuq al- mubīni -Wa laqad ra’āhu bil-uḥuqil-mubini.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	Alḥamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn Alḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah swt. Yang memberikan kita kesehatan kesempatan, dan panjang Umur sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Loyalitas Rakyat terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna (studi kasus di Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang mana ia telah membawa kita dari zaman kejahatan hingga zaman kebaikan yang disinari Iman dan Islam semoga beliau selalu mendapat kesejahteraan bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya kelak. *Amin ya robbal Alamin.*

Dalam penulisan Skripsi ini penulis masih jauh dari kata sempurna baik dari proses maupun isinya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, memotivasi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara dan bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dan juga berterima kasih kepada bapak Ramadhan

Syahmedi selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab serta berterima kasih kepada kak Putri Ramadhani, M.Hum dan Bang Zuhri Arif Sihombing SH yang telah banyak memberikan dukungan.

4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan Bimbingan, keluangan waktu,tenaga serta dorongan dan semangat kepada penulis daam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Syahnna MA selaku Penasehat Akademik yang selama ini selalu nasehat selama menjadi Mahasiswa dari Semester Awal dan Akhir.
6. Terima Kasih Kepada kedua Orang tuaku tercinta yaitu Raja Inal Siregar dan Siti Ajum Harahap yang telah menjadi penerang hidup, penyemangat,serta mendidik dan mengasuh sebaik-baiknya dan hadiah ini penulis hadiahkan kepada kalian dan kasih sayang tak terhingga yang telah memberikan motivasi sebanyak-banyaknya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat.
7. Terima kasih kepada Arri Aliansyah Siregar SHI., M.Si yang telah menjadi abang terbaik, abang yang hebat dalam memberi dukungan,nasehat, kepada penulis serta adikku-adikku, Hotma Nur Regina, Ervinsyah Toguan, Iqbal Harun dan adik kecil ku Muhammad Posamir Siregar yang telah banyak memberikan keceriaan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Terima kasih kepada Maruli Nasution selaku Uda dan Leli Suryani selaku Ujing yang telah banyak memberikan kasih sayang yang kedua setelah ayah dan ibu penulis, serta keluarga besar Mahir Siregar dan Borlian Harahap selaku Kakek dan Nenek dan terima kasih untuk kakak ipar ku Sang Diah Pitaloka dan Kak Roma Doniaty Tanjung yang telah menjadi kakak terbaik.

9. Terima Kasih Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), KAMMI Merah Saga, KAMMI Medan, Departemen Kebijakan Publik, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ 2016-2017), Sekretariat Merah Saga, Pondok Bapak Bakri, Muslimah Humairah. Keluarga KKN 31
10. Sahabat Perbandingan Madzhab yaitu: Aulia Ulfa Mingka, Nur Khoiriah, Elvi sari Wahyuni, Nuridha Ritonga, Desi Novia Sarah, Rezkia Zahara Lubis, Latifa Hanum, Sugi Hartini, Juraidah Nasution, Imam Setiaji, Munazir Muhammad, Apri Yudiansyah, Muhammad Fauzan Ritonga, Fadhlán Warid Ghea, Syahwardi Pohan, Muhammad Alfahroby, Muhammad Ibrahim Lubis, Rahmat Ibrahim Harahap, Ayyub Zaki Siregar, Salman Erlangga Siregar, Fahmi Akhyar, Marauli Harahap, Alamsyahputra Siregar, Aisyah Putri Miranda Lubis, Herry Syahputra Harahap, Rita Rahmadhani Siregar, Adelita Rahmadona Sitepu, Adenita, Desi Ratnasari, Rizki Novrianda dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah menjadi penyemangat ku.
11. Dan ucapan Terima Kasih banyak untuk Sahabatku Muhammad Ibrahim Lubis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak mengajari penulis dalam mengerjakan Qira'atul Kutub, dan juga memberi semangat semoga Allah membalas kebaikan mu sahabat, serta terima kasih kepada Sahabat saya yang paling gokil yaitu, Putri Ayu Sandi Tumanggor, Nur Khoiriah Hasibuan, Evina Al-Afriliani Hasibuan, Lili Aulia dan Rizki Wahyuni selaku teman kos.

12. Bagian administrasi yang telah banyak memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengurus berkas-berkas dan penyelesaian prosedur kemahasiswaan penulis selama ini dari awal dan akhir, serta staf dan karyawan perpustakaan. Khususnya Fakultas tercinta yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi Fakultas terbaik bagi Penulis.

Medan, 6 November 2018

Siti Samsuriati Siregar
22.14.4.029

DAFTAR ISI

IKHTISAR

PEDOMAN TRANSLISASI ARAB-LATIN	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kajian Terdulu	14
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Loyalitas Rakyat Kepada Pemimpin	21
B. Prinsip-prinsip Kepemimpinan	27
C. Syarat-syarat Pemimpin	31
D. Tanggungjawab Pemimpin	36

BAB III. RIWAYAT HIDUP IMĀM AL MAWARDI DAN HASAN AL BANNA

A. Biografi Al Mawardi	41
1. Riwayat Kehidupan Al Mawardi	41
2. Latar Belakang Pendidikan Al Mawardi	42
3. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Al Mawardi	46
B. Biografi Hasan Al Banna	51
1. Riwayat Kehidupan Hasan Al Banna	51
2. Latar Belakang Pendidikan Hasan Al Banna	53
3. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Hasan Al Banna	55
C. Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuanbatu Selatan	59
1. Letak Geografis	59
2. Penduduk Desa Batang Nadenggan	60
3. Aparatur Desa Se Kecamatan Sungai Kanan	62

4. Agama Penduduk Kecamatan Sungai Kanan	63
5. Sarana dan Prasarana	63
6. Jarak Wilayah	64

BAB IV. HUKUM LOYALITAS RAKYAT KEPADA PEMIMPIN MENURUT AL MAWARDI DAN HASAN AL BANNA

A. Loyalitas Rakyat Kepada Pemimpin	
Menurut Al Mawardi dan Hasan Al Banna	60
1. Pendapat Al Mawardi	65
2. Pendapat Hasan Al Banna	69
B. Perbedaan Pendapat Al Mawardi dan Hasan Al Banna	76
C. Pendapat Masyarakat Desa Batang Nadenggan Terhadap Loyalitas Rakyat Kepada Pemimpin	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	88
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat kesepakatan dikalangan kaum muslimin bahwa eksistensi imamah adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Imamah di perlukan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan manusia secara bersama-sama. Imamah dengan otoritas politik formalnya, di samping berfungsi sebagai pengatur tatahubungan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai konflik-konflik yang timbul di antara mereka. Pada sisi lain tidak seorang muslimpun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran. Islam mengatur semua persoalan kehidupan manusia baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat luas.¹

Imam al-Jurjani berpendapat keharusan menegakkan institusi imamah termasuk di antara tugas-tugas kaum muslimin yang paling urgen dan tujuan-tujuan penerapan hukum agama yang paling mulia. Karena kedudukan negara sahabat urgen dan strategis dalam Islam, maka antara imamah dan agama tidak dapat di pisahkan sebagai hubungan simbiosis mutualistik. Oleh karena itu Hamka berpendapat, bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan imamah dari agama²..

¹Hussein Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik*, Dalam Suedy (ed), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*(Yogyakarta: LKiS, 2000), hal.88.

²Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik HAMKA* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 63.

Baginda Muhammad bin Abdullāh adalah seorang Rasul yang diutus untuk menyampaikan Islam kepada manusia dan telah menempatkan diri sebagai Imam (pemimpin). Beliau merupakan pemimpin bagi sebuah negara bernama Madinah. Beliau adalah seorang pemimpin bagi umat Islam dalam ikatan agama dan juga pemimpin bagi umat Madinah dalam ikatan kenegaraan, sehingga tidak mengherankan kesimpulan yang dilakukan oleh Micheal Heart dalam bukunya *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia*, meletakkan Nabi Muhammad sebagai tokoh pertama.

“Permasalahan krusial yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasūlullāh Muhammad SAW adalah tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan Rasūlullāh sebagai pemimpin bagi umat Islam.”³ Dalam hal ini pemimpin umat untuk tetap menjalankan agama dan pemimpin umat menuju kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

“Adanya pemimpin di tengah-tengah umat Islam adalah perkara yang sangat penting. Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah masyarakat yang 60 tahun berada di bawah pimpinan kepala negara (pemimpin) yang zalim lebih baik dari pada tidak memiliki pemimpin meskipun itu hanya semalam.”⁴ Artinya, Ibnu Taimiyah juga telah menegaskan betapa pentingnya kedudukan pemimpin di tengah-tengah umat Islam.

³Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah; Kontektualisasi Dokterin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal.45.

⁴*Idem* dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hal.37.

“Kepemimpinan adalah pengaruh. Makin kuat kepemimpinan seseorang, akan makin kuat pula pengaruhnya. Begitu pula dengan Rasulullah, dan begitupula pemimpin yang mengikuti jejak beliau⁵.” Sebagaimana yang disampaikan oleh Al Mawardi dalam *Al Ahkamus Sulthaniyah* bahwa tujuan dari sebuah Negara (kepemimpinan) adalah *hirosatiddini wa siyasatid dunya* yakni menjamin terselenggaranya ajaran agama dan mengatur urusan dunia (berkaitan dengan kesejahteraan rakyat).

Sejarah membuktikan bahwa Islam sudah berjalan sepanjang 15 abad, mulai dari periode klasik (hingga tahun 1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sekarang). Dan dalam perjalanan panjang sejarah tersebut, praktik kepemimpinan tidak pernah lepas dari kehidupan umat Islam. Hal ini juga menjadi bukti bahwa umat manusia khususnya umat Islam memang wajib untuk memiliki pemimpin dalam mengatur kehidupan umat menuju kemaslahatan.

Pentingnya pemimpin dalam Islam bukanlah untuk tujuan memperoleh kehormatan, melainkan untuk mencapai visi besar yaitu kemaslahatan umat. Sebuah gelar pemimpin umat bukanlah semudah membalikan telapak tangan atau melangkahkan kaki. “Pemimpin adalah seorang yang memiliki sifat memimpin, membimbing atau menuntun seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Islam wajib mengikuti jejak langkahnya⁶.” Dalam perkembangan zaman dari waktu ke waktu, praktek kepemimpinan tidak sedikit yang mengalami

⁵Hasan Al-Banna, *Konsep Pembaharuan Umat Islam* (Jakarta : Media Dakwah,1987) hal. 49

⁶Drs. Muhammad Khozin Dahlan, M.SI dan Drs. Muhammad Sya’roni, *Teori Dan Gaya Kepemimpinan di Dunia* (Jombang: Multaza, 2012), hal. 9

gonjang-ganjing. Kepemimpinan kerap kali mengalami konflik atau permasalahan antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya.

Beberapa fakta historis yang bisa dilihat dalam hal ini adalah sejarah kehidupan tiga diantara empat *Khulafaur rasyidin* mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Siapa yang tidak mengenal Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb. Orang yang telah diridhai oleh Rasūlullāh dan Abu Bakar. Orang yang sangat setia kepada Rasūlullāh, menemani Beliau dengan baik ketika menyampaikan dakwah.⁷ Orang yang sangat tegas terhadap pejabat-pejabatnya namun lembut dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Orang yang sangat takut kepada Allah ‘Azza wa Jalla, yang pada siang hari tegas bagai singa tak terkalahkan dan malam bagai seorang bayi yang lemah tak berdaya. Siapapun yang meminta keadilan padanya pasti akan ia berikan keadilan.

“Begitu juga dengan Uṭman bin Affān, orang yang sangat dermawan dalam membela agama Allah. Tidak pernah merasa dirugikan sedikitpun, Uṭman telah memperniagakan hartanya dijalan Allah. Begitu banyak harta yang sudah ia korbankan demi menyiarkan agama Allah, khususnya saat-saat sulit dan susah.”⁸ Dan ‘Ali bin Abi Tālib yang sedari kecil sudah diajarkan oleh Nabi tentang suri tauladan. Bahkan beliau mendapat restu dari Nabi Muhammad untuk menjadi menantu atas putri Baginda mulia yaitu Fatīmah binti Muhammad.

⁷Ibrahim Al-Quraibi, *Tarikh Khulafa*, terj. Faris Khairul Anam (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 326

⁸*Ibid*, h. 573

Sejarah telah membuktikan dengan jelas bahwa ketiga Khalifah yang adil itu ternyata gagal dalam melatakkkan dirinya sebagai pemimpin yang disukai oleh seluruh rakyatnya. Bukan karena mereka tidak adil, namun karena keadilan yang mereka lakukan tidak seiring dengan keadilan yang diinginkan oleh sebagian rakyatnya. Pada akhirnya mereka meninggal dunia karena dibunuh oleh rakyat yang berada di bawah tambuk kepemimpinan mereka.

Tiga orang khalifah di atas merupakan tiga dari empat orang khalifah yang bergelar *Khulafa' Ar-Rasyidīn*. Dan diluar daripada itu, ada juga seorang khalifah pada masa Bani Umayyah [Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz] yang sangat wara', adil dan bijaksana. Bahkan, salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa pada masa pemerintahannya, tidak ditemukan orang yang miskin atau fakir untuk diberikan zakat. Akan tetapi, "Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz juga akhirnya ia meninggal dunia kerana diracun oleh keluarganya. Karena merasa tidak senang dengan kepemimpinannya."⁹

Bahkan, sejarah modern telah menunjukkan bahwa telah banyak perlawanan kepada seorang pemimpin saat sedang berkuasa, tidak hanya kritik, tetapi sampai kepada kegiatan kudeta dan revolusi. Hal ini pernah dialami oleh Mesir, Turkey bahkan Indonesia.

Pertama, Mesir. Muhammad Mursi adalah Presiden pertama Mesir yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin dan berakhir setelah memimpin selama 18 bulan. Setelah berjuang selama kurang lebih 84 tahun untuk mencapai

⁹Iqbal, *Fikih Siyasah*, h. 85-86

kekuasaan, namun ketika berhasil, Ikhwanul Muslimin hanya bisa mempertahankan kekuasaannya itu selama 18 bulan. Kudeta militer pada Juli 2013 telah menggulingkan pemerintahan legal Mursi dan sejak saat itu, periode gelap lain bagi Ikhwanul Muslimin dimulai. Pemerintah Mesir pasca Mursi mulai menerapkan kebijakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin Untuk menghapus dukungan kepada Ikhwanul Muslimin, pemerintahan El Sisi memasukkan kelompok tersebut ke dalam daftar organisasi teroris. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait menyambut keputusan tersebut dan ikut memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar kelompok teroris.

Kedua, Turkey. Angkatan Bersenjata Turki ternyata punya sejarah khusus terkait upaya perebutan kekuasaan lewat cara kekerasan. Tentara Turki tidak asing dengan kudeta sebagai upaya mengganti rezim yang dirasa berseberangan dengan agenda elit militer. Elit-elit militer Turki sampai sekarang didominasi kalangan nasionalis dan sekuler, yang sangat mengidolakan Mustafa Kemal Attaturk, bapak bangsa Turki yang membubarkan Khilafah Turki Usmani. Stasiun Televisi Aljazeera memuat kronologi upaya kudeta oleh militer sepanjang sejarah Turki modern.

Kudeta pertama terjadi pada 1960. Saat itu Perdana Menteri Adnan Menderes ingin memberi keleluasaan pada penganut agama Islam untuk kembali beribadah. Masjid-masjid dibuka lagi, demikian juga pemberian izin adzan memakai pengeras suara. Pada era 1960, kalangan sekuler masih sangat kuat. Tekanan pada Menderes meningkat. Karena panik, Menderes menetapkan jam malam, merepresi lawan-lawan politiknya. Pada 27 Mei 1960, tentara mengikuti

desakan rakyat menggulingkan PM Menderes. Sang perdana menteri kemudian dihukum mati. Jenderal Cemal Gursel ganti berkuasa hingga 1965.

Kudeta kedua terjadi pada 1971. Latar belakangnya adalah resesi ekonomi yang membuat rakyat marah. Pemerintahan yang dipimpin PM Suleyman Demirel dinilai gagal memenuhi tuntutan rakyat terkait penurunan harga pangan, inflasi, serta membuka lapangan kerja. Militer kembali melakukan kudeta, dengan alasan mengembalikan tata tertib bermasyarakat. Demirel dipaksa mundur. Lantas Nihat Erim dari Partai Republikan diangkat menjadi pemimpin baru.

Periode 1970-an sangat tidak kondusif dalam panggung politik nasional Turki. Negara mayoritas muslim dengan wilayah di dua benua ini mengganti perdana menteri hingga 11 kali. Pertarungan elit partai dianggap tentara tidak bisa berkontribusi positif terhadap stabilitas negara. Alhasil, saat konflik antar partai memuncak pada 1980, militer kembali melakukan kudeta terhadap kepemimpinan PM saat itu. Laksamana Bulend Ulusu mengambil alih pemerintahan hingga 1983.

Kudeta pada 1997 ini yang paling aneh, karena sama sekali tidak mengerahkan tentara keluar barak. Militer merasa gerah karena Partai Islam Sejahtera tidak kunjung membangun koalisi permanen selepas menang pemilu 1995. Perdana Menteri Necmettin Erbakan kemudian didatangi petinggi militer, yang mengaku hanya memberikan 'saran' untuk perbaikan bangsa. Saran-saran itu misalnya larangan berhijab, membatasi pendidikan pesantren, dan beragam

kebijakan sekuler lainnya. Erbakan dipaksa mundur pada 1998, lalu dilarang berpolitik selama lima tahun. Partainya bubar. Erdogan adalah anggota partai Islam sejahtera itu, yang kemudian ikut mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) beberapa tahun berikutnya.

Ketiga, Indonesia. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru.¹⁰ Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut

¹⁰Edward, Aspinall, *Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal.333.

¹¹Ahmad Mansur Suryanegara. *Api Sejarah*, (Bandung: PT Salama dan Pustaka Semesta, 2000), hal.250.

mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Hingga akhirnya, Soeharto pun akhirnya menyatakan diri untuk berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998.

Peristiwa diatas adalah bentuk perlawanan (ketidaktaatan) rakyat kepada penguasa atau pemimpin yang melakukan suatu kebijakan. Padahal, berdasarkan salah satu ayat al-Quran, Surah An-Nisa (4) ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul dan (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹²

Kata "ulil amri" dalam ayat di atas menunjuk kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayahnya (pemerintah). Ayat ini menegaskan bahwa selain umat Islam patuh dan taat kepada Tuhan dan Rasul-Nya, mereka juga diwajibkan taat kepada penguasa mereka. Bahkan, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwa:

¹² Tim Penterjemah al-Quran, al - Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li al-Taba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H.), hlm. 128.

« يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».

Artinya: “Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?” Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.” (HR. Muslim no. 1847)

Dalam hadis lain, Nabi menguatkan kewajiban mentaati penguasa sebagai realisasi kesatuan jamaah kaum Muslimin dan penjagaannya, dan pelestarian hubungan antara pribadi-pribadi umat dengan pemerintahnya, serta memerintahkan untuk bersabar ketika menjumpai sesuatu yang tidak disenangi dari pihak penguasa. Dalam sikap tersebut terkandung pencegahan bahaya dan keburukan yang merajalela dan fitnah yang menjadi-jadi, agar umat tetap saling berpegangan sekuat tembok bangunan. Hadis ini menyatakan: "Barang siapa melihat pada Amirnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar atasnya, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal lalu mati, maka ia mati sebagai orang jahiliyyah.”¹³

¹³ Al-Bukhari, op.cit., jilid VI, hlm. 2588; Muslim, op.cit., jilid III, hal1477.

Imam al Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan hadits dalam Shahihnya.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَلَّمَ بَنُ يَزِيدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ قَامَتِ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَنَا مَرُونَا فَمَا عَرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي ثَالِثَةٍ فَجَذَبَهُ إِلَّا شَعَثَ بَنُ قَيْسٍ وَ قَالَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا فَأَتَيْنَاهُمْ مَاحِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ¹⁴

Artinya : Muhammad bin al- Musanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wa'il Al-Hadharami, dari ayahnya, dia berkata,” Salamah bin Yazid Al-Jufi bertanya kepada Rasulullah SAW dengan berkata, “ Wahai Rasulullah! Bagaimana jika datang kepada kami pemimpin yang menuntut haknya dari kami sementara mereka menahan hak kami, apa yang harus kami lakukan?” Beliau berpaling dari orang yang bertanya itu. Kemudian ia bertanya lagi dan Beliau berpaling lagi. Kemudian dia bertanya lagi yang kedua dan yang ketiga, kemudian Al-Asy'ats menarik orang itu. Beliau bersabda, “ Dengarkan dan taatilah! Mereka bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada kalian.

Para ulama kemudian menyampaikan hasil ijtihad mereka tentang bagaimana seharusnya menyikapi kebijakan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. “Menurut Imam Nawawi, tidak boleh melawan para penguasa dan wali semata-mata karena munculnya ked{aliman dan kefasikan, selama mereka tidak merubah sedikitpun dari prinsip-prinsip Islam. Menurut al-

¹⁴Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Fitan, Bab *Maa jaa'a Satukunu Fitan Ka Qitha'i Al-Lail Al-Muzhlum* (nomor 2199),Tuhfah Al Asyraf (nomor 11772), hal.148.

Maududi, sekalipun penguasa (pemimpin) melakukan salat secara pribadi, maka mereka masih tetap berhak untuk disetia'i atau ditaati.”¹⁵

Imam Bukhari telah mengkhususkan satu bab tentang hadis ini dalam pembahasan al-Ahkam dari kitab sahihnya, yaitu bab firman Allah yang bermaksud: “Taatilah Allah dan Rasulnya serta Ulil Amri antara kamu”. Berkata al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bahwa di dalam hadis ini disebutkan tentang wajibnya mentaati para pemimpin, tetapi ia terbatas dalam hal-hal yang bukan maksiat”. Dan lafaz dari Imam Muslim yaitu kecuali apabila kamu melihat bahwa pemimpin itu telah kafir secara terang-terangan dengan bukti (kenyataan dalil) dari Allah”. (Sahih Muslim 3/ No. 1470)

Oleh karena itu, melihat pandangan Ulama yang berbeda tentang masalah ketaatan kepada pemimpin, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Imam Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna (Studi Kasus: Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan jawaban tentang Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Imam Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna (Studi Kasus: Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagaimana berikut ini.

¹⁵Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. (Bandung: Mizan, 1995), hal.168-173.

1. Bagaimana Hukum Loyalitas Rakyat terhadap Pemimpin menurut Al-Mawardi dan Hasan al- Banna?
2. Apa perbedaan pandangan Al-Mawardi dan Hasan al- Banna tentang Hukum Loyalitas Rakyat terhadap Pemimpin?
3. Pendapat manakah yang diimplementasikan masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang hukum loyalitas rakyat kepada pemimpin?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum loyalitas rakyat terhadap pemimpin menurut Al-Mawardi dan Hasan al- Banna.
2. Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara pandangan Al-Mawardi dan Hasan al- Banna tentang hukum loyalitas rakyat terhadap Pemimpin.
3. Untuk mengetahui pendapat yang diikuti oleh masyarakat di Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang hukum loyalitas rakyat terhadap Pemimpin.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian, penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Diantara kegunaan tersebut adalah sebagai berikut.

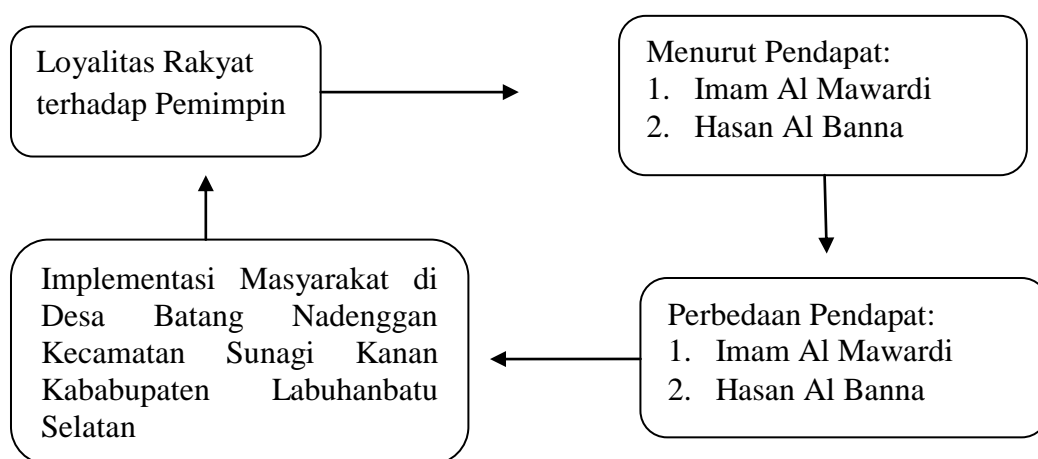
1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
3. Menambah khazanah dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah khilafiyah dan hukum Islam yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.
4. Sebagai bahan kajian studi ilmiah dalam diskusi lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah yang sama.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi atau penelitian ini, penulis melakukan pemahaman dan pengkajian terhadap skripsi atau buku yang terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini. Diantara buku atau skripsi yang dimaksudkan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, buku yang berjudul *Al Ahkamus Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi yang membicarakan tentang kepemimpinan dalam Islam atau *Siyasah Islamiyah*. Buku ini berbicara tentang luasnya pengaturan Islam terhadap kepemimpinan, mulai dari tujuan kepemimpinan dalam Islam, kriteria seorang pemimpin atau imam dalam Islam, mekanisme dalam memilih imam atau pemimpin dan bahkan sampai kepada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh imam dan rakyat dalam sebuah Negara. Bahkan tidak hanya itu, luasnya pembahasan buku ini tidak sekedar berbicara tentang pengangkatan kepala Negara, tetapi juga berbicara tentang pengangkatan gubernur, panglima perang, jabatan hakim, dan jabatan wali pidana.

F. Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat di Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung lebih mengaplikasikan pendapat Al Mawardi terhadap Implementasi Loyalitas Rakyat terhadap Pemimpin.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah, maka penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti objek yang alamiah, yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”¹⁶

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode *library reaserch* (ke pustakaan) dan wawancara. Penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu “penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.”¹⁷ Dengan perkataan lain penelitian kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data pustaka yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisa, selanjutnya mengambil kesimpulan secara sistematis.

¹⁶Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 122

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan data yang akan dikumpulakn terkait dengan kepemimpinan (pemerintahan), siyasah dan tentang *tafsir* maupun *syarah* *Hadis* dan sebagainya tentang loyalitas rakyat terhadap pemimpin.
- b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan kepemimpinan (pemerintahan), siyasah dan tentang tafsir maupun syarah hadis tentang loyalitas rakyat terhadap pemimpin.
- c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan kepemimpinan (pemerintahan), siyasah dan tentang tafsir maupun syarah *Hadis* tentang meminta jabatan.yang nantinya akan dijadikan manhaj dalam penelitian ini.
- d. Menganalisis isi buku tersebut dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga mendapatkan hasil yang ingin didapatkan.
- e. Melakukan wawancara dengan informan yang kompeten terhadap masalah yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Pada intinya, data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

- a. Sumber Primer yang dimaksudkan adalah sumber dasar yang memuat bahan dan pernyataan dari tokoh yang menjadi objek penelitian. Data-data akan diperoleh dari buku-buku pokok yang menjadi rujukan utama peneliti yang merupakan karya tokoh itu sendiri. Adapun buku yang merupakan karya tokoh dalam penelitian ini adalah *Al Ahkamus Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi dan Risalah Pergerakan Hasan Al Banna.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diantara tokoh agama tersebut adalah Bapak Pangadilan Hasibuan, Arri Aliansyah Siregar dan Muksin Alatas.

- b. Sumber Sekunder yang dimaksudkan adalah sumber pendukung yang bukan karya tokoh yang menjadi objek penelitian. Melainkan adalah karya-karya tokoh lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari buku-buku ini adalah sebagai data pendukung bagi peneliti baik kitab tafsir maupun kitab hadis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), (2) paparan/sajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/*verifikasi*.

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Setelah peneliti mulai mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka peneliti akan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Agar permasalahan tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan judul penelitian.

b. Penyajian Data

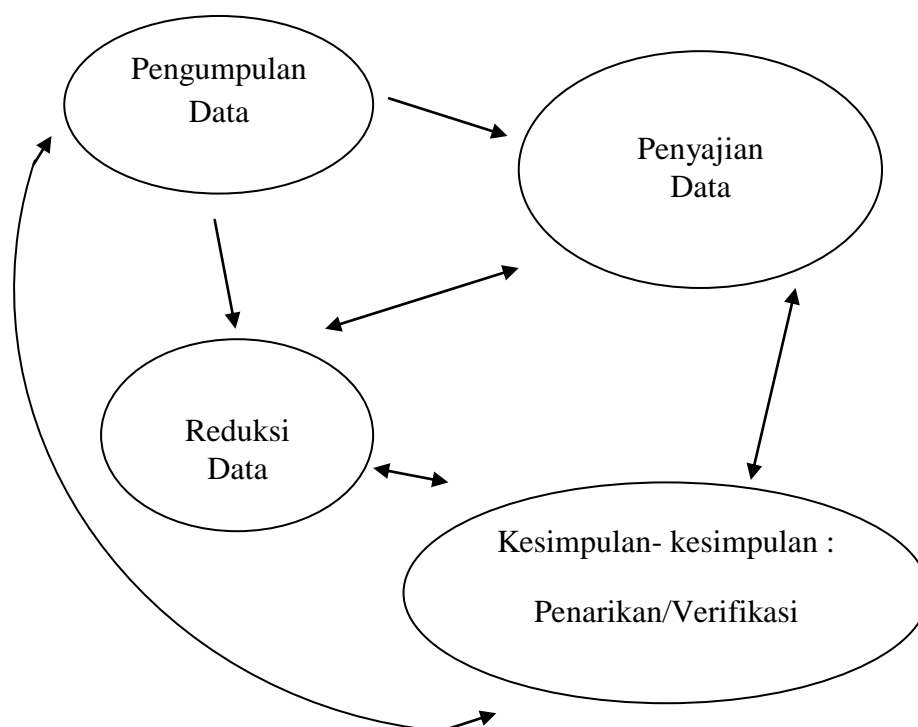
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Diantara jenis penyajian data kualitatif adalah jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. (Matthew dan Huberman, 1992).

Data yang sudah dikumpulkan dengan metode sebagaimana dijelaskan diatas akan direduksi agar terseleksi dengan baik dan tidak melebar. Sebab apabila melebar, peneliti akan tersesat dalam menjawab rumusan masalah penelitiannya. Setelah itu, dilakukanlah penyajian terhadap data yang sudah direduksi pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

c. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah kegiatan akhir dari analisis data. Data yang sudah disajikan sebelumnya sangat besar kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Akan tetapi, apabila peneliti tetap merasa kurang dengan hasil penelitian, maka bisa dilakukan pengumpulan data dari awal. Inilah yang dimaksud dengan verifikasi.

Penarikan kesimpulan nantinya akan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif yaitu proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.



Gambar 2.1 Komponen-komponen analisis data : Model Interaktif (Matthew dan Huberman, 1992)

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, hipotesa penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II: Memaparkan tentang landasan teoritis yang memuat pengertian penulis menjelaskan pandangan umum tentang loyalitas, seperti: pengertian loyalitas, dalil tentang kewajiban rakyat taat terhadap pemimpin, batasan taat kepada pemimpin, dan ruang lingkup ketaatan kepada pemimpin dan penguasa.

BAB III: Menguraikan sekilas tentang biografi Al-Mawardi Dan Hasan Al-Banna, selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni Desa Batang Nadenggan Kab.Labuhanbatu Selatan.

BAB IV: Penulis menjelaskan pendapat Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna mengenai loyalitas rakyat terhadap pemimpin dan dalil yang dipakai dari kedua Imam tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan munaqasyah adillah, lalu dipilihlah pendapat yang rajih serta tanggapan masyarakat (Tokoh Masyarakat) mengenai loyalitas rakyat terhadap pemimpin.

BAB VI: Adalah penutup, yakni memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian dan pemberian saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Loyalitas Rakyat Kepada Pemimpin

Sebelum penulis menyampaikan pengertian ketaatan rakyat kepada pemimpin, maka terlebih dahulu penulis menguraikan arti beberapa kata dalam variabel yang ada di dalamnya.

1. Pengertian Loyalitas

Loyalitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah kesetiaan, ketaatan, kepatuhan¹⁸. Istilah dari kata loyalitas sebenarnya lebih dekat dengan ketaatan. Sedangkan istilah loyalitas dalam bahasa arab secara etimologi disebut *walayah* yang artinya pertolongan dan *al-wala*¹⁹ Artinya pemuliaan, pembelaan, cinta, dukungan, dan bersama-sama orang yang dicintai lahir dan batin.

Beberapa kata yang terkait dengan *wala'* adalah *al-muwalah* yaitu seseorang yang memberi dukungan kepada satu pihak, *maula* yaitu memiliki banyak arti, semuanya berasal dari *al-nursah* (dukungan) dan *al-mahabbah* (cinta), *walayah* (dukungan), *al-walyu* (kedekatan) dan *wali* yang dapat diartikan orang yang mengurus orang lain.²⁰

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Cet. 2, hal. 533.

¹⁹Sai'd Hawwa dan Sayyid Qutub, *Al-Wala'* (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2001) hal. 1.

²⁰Irwan Prayitno, *Al-Haq wal Bathil*, (Bekasi: Pustaka Tarbiatuna, 2002) hal. 97

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap peraturan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal individu. Faktor internal meliputi: penyesuaian diri terhadap sekolah, kontrol diri, serta kondisi emosi. Faktor eksternal yaitu meliputi: keluarga, demografi (usia, suku, jenis kelamin), hubungan dengan teman sebaya, figur guru, sistem sekolah yang berupa kebijakan peraturan, lingkungan sekolah, serta hukuman yang diberikan oleh guru.²¹ Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, ketaatan merupakan kemauan menaati sesuatu dengan takluk dan tunduk.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, SH Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

²¹Brown, Perception of Student Misconduct, Perceived Respect for Teachers, and Support for Corporal Punishment Among School Teachers in South Korea: An exploratory case study, (Journal Educational Research for Policy and Practice, 2009) , vol. 8, hal. 3-22.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.²²

Loyalitas adalah satu pilar pemerintahan dalam Islam dan menjadi salah satu landasan sistem politiknya. Tidak terbetik dalam bayangan siapapun jika terdapat suatu sistem yang baik, negara yang kuat, dan tentram tanpa adanya keadilan dari penguasa dan loyalitas dari rakyat kepada *umara*. Umar bin Khattab menjelaskan tentang pentingnya taat dalam agama ini dengan mengatakan: "Tidak ada arti Islam tanpa jama'ah, tidak ada arti jama'ah tanpa *amir*, dan tidak ada arti *amir* tanpa kepatuhan". Sebab Islam bukanlah agama individu melainkan agama komunitas dan Islam tidak dapat diwujudkan secara paripurna kecuali dengan adanya komunitas.²³

2. Rakyat

Rakyat adalah satu unsur penting yang ada dalam sebuah Negara. Negara tanpa rakyat, tidak memenuhi syarat disebut sebagai sebuah Negara. Bahkan pemimpin atau imam itu berasal dari rakyat itu sendiri. Dan banyak Negara di dunia menerapkan sebuah sistem, bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat dari Negara tersebut.

Unsur kedua dari pada unsur-unsur yang membentuk negara adalah rakyat, dimana kekuasaan (pemerintahan) menangani urusan-urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta memutuskan segala perkara

²² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998), hal. 348

²³ Muhammad Aabdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Pres, 1999). hal. 45

yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari keutamaan dan prioritasnya, rakyat merupakan unsur pertama, dimana para penguasa bisa berdiri tegak.

Dalam kehidupan bernegara, rakyat memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara. Perlindungan itu diantaranya adalah jaminan tidak adanya gangguan dari orang lain, baik sesama warga Negara maupun dengan warga Negara lain (asing). Artinya, kenyamanan hidup bernegara oleh rakyat dalam harus dijamin oleh pemimpin. Selain itu, pemimpin harus mengupayakan kelangsungan kehidupan rakyat. Menjamin kesejahteraan rakyat dengan memberikan lapangan kerja yang banyak dan mencukupi untuk sisi ekonomi kehidupan rakyat.

3. Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang memimpin atau seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya dan kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Sukses tidaknya sebuah kelompok masyarakat itu sangat tergantung daripada siapa yang menjadi pemimpin. Maka dari itu menjadi seorang pemimpin itu adalah tugas yang sangat mulia namun sangat banyak hal-hal yang harus diperhitungkan. Karena pertanggung jawaban itu akan selalu diminta oleh Yang Maha Kuasa. Keharusan untuk memilih pemimpin diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada Pasal 6 ayat 1 dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pemimpin dapat di kelompokkan menjadi pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan formal kepemimpinan dalam suatu organisasi formal yang didirikan berdasarkan undang- undang atau peraturan Negara atau peraturan perusahaan. Misalnya, Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kepala Desa. Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak menduduki jabatan organisasi formal dalam sistem sosial, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap para anggota sistem sosial.²⁴

Pemimpin menurut Suradinata adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga . Termasuk juga Negara. “Sedangkan kepemimpinan menurut Soerjono Soekanto adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang tersebut bertindak laku sebagaimana yang di kehendaki oleh pemimpin tersebut.”²⁵

²⁴ Wirawan,. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 9

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*(Jakarta: P.T.Raja Grafindo, 2007) hal. 288

4. Loyalitas Rakyat kepada Pemimpin

Dari uraian diatas, dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan ketaatan kepada pemimpin adalah suatu sikap atau perilaku yang berhubungan dengan dukungan rakyat kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin.

Sebagai seorang yang pemimpin, masyarakat yang dipimpin haruslah mendukung dan mencintai pemimpinnya. Taat kepada penguasa yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun zalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap fardhu bagi seluruh kaum muslimin.

B. Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya suatu kekuasaan dan sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan pemerintahan. Kepemimpinan Islam harus dilandasi ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang acuan utamanya adalah meneladani Rasulullah SAW.

Kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah SAW berlandaskan pada dasar-dasar yang kokoh. Yang pada prinsipnya untuk mengakkan kalimah Allah. Prinsip-prinsip atau dasar kepemimpinan atau dasar-dasar kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:²⁶

1) Dasar Tauhid

Dasar tauhid atau dasar menegakkan kalimah tauhid serta memudahkan penyebaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an prinsip ini dijelaskan dalam Qu'an Surah Al Ikhlas ayat 1-4 , yaitu:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al Ikhlas : 1-4)

2) Dasar persamaan derajat sesama umat manusia

Pada prinsip ini bahwa manusia memiliki derajat yang sama dimata hukum dan dalam kehidupan sesama warga negara, hanaya saja yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dalam ajaran Al-Qur'an yaitu:

²⁶Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet, Pertama, hal.187

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujarat : 13)

Islam tidak pernah mengistimewakan ataupun mendiskriminasikan individu atau golongan warga negara, baik dimata hukum, ekonomi, dan syariah. Semua sama tidak ada yang berbeda. Islam juga melindungi hak-hak kemanusiaan siapapun dia, muslim atau non muslim, selama mau hidup bersama dan taat terhadap pemimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan.

Dasar persatuan Islamiyah (uhkwah Islamiyah) atau prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip ini untuk menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam dalam Al-Quran yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ﴿١٣٠﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.....” (QS. Ali Imran: 103)

3) Dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat

Islam selalu menganjurkan ada kesepakatan dari orang-orang terkait dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih kehidupan bernegara untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram dalam suatu masyarakat tersebut.

Dalam Al-Qur'an menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Ali Imran: 159)

Musyawarah diartikan sebagai meminta pendapat kepada orang yang berkompeten dalam urusannya, atau meminta pendapat umat atau orang-orang yang diwakilinya dalam urusan-urusan umum yang berhubungan dengannya. Dengan pengertian demikian maka umat Islam menjadikan musyawarah sebagai dasar pijakan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kaidah-kaidahnya.

Dengan musyawarah juga umat Islam dapat memilih dan mencalonkan kandidat yang memiliki sikap keadilan dan dianggap memiliki kompetensi dalam kepemimpinan untuk mengurus kepentingan mereka.

4) Dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat

Atas dasar prinsip ini khalifah atau pemimpin negara harus menegakkan persamaan hak segenap warganya. Maka dari itu seorang pemimpin negara memiliki kewajiban menjaga hak-hak rakyat dan harus dapat merealisasikan keadilan diantara mereka secara keseluruhan tanpa terkecuali. Prinsip ini didasari firman Allah yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Al Nahl: 90)

Keempat prinsip tersebut harus senantiasa dijadikan landasan dalam menetapkan setiap kebijakan pemerintahan sehingga tujuan kepemimpinan dalam Islam dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

C. Syarat-syarat Pemimpin

Imam Al-Mawardi, berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:

1. Bersifat adil (al-, adalah). Sifat ini adalah fundamental. Tanpa *al* adalah kepemimpinan negara tak ideal.

2. Berpengetahuan (al-alim). Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kepala negara dalam berjihad dan berjihad. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad kepala negara mutlaq diperlukan.
3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna. Sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomodifikasinya dengan baik.
4. Seorang kepala negara harus mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
7. Berasal dari keturunan quraissy. Pernyataan ketujuh ini sengaja diungkap Al-Mawardi untuk melanggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong Bani Buwaih dan Bani Fatimiyah yang Syi'ah.²⁷

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun²⁸, berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 4 kriteria saja, yaitu:

1. Berpengetahuan luas
2. Adil
3. Mampu mengemban tugas sebagai kepala negara
4. Sehat badan serta utuh semua panca inderanya
5. Keturunan Quraisy

²⁷Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Kitab al Imiah, t.th.) hal.165.

²⁸Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), Penerjemah Tim Pustaka Al Kautsar, hal389

Kriteria tersebut, merupakan kriteria umum yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam tulisannya. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan history dalam pemerintahan Ibnu Khaldun itu sendiri, ternyata kriteria tersebut tidak hanya meliputi keempat kriteria itu saja, melainkan juga termasuk dalam beberapa kriteria lainnya.

Seorang pemimpin, menurut Al Ghazali memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Oleh karena itu seorang pemimpin menurut Al-Ghazali harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Tanggung jawab. Hal yang harus diketahui oleh seorang pemimpin adalah batas dan kadar kekuasaan serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan untuk sesegera mungkin mengevaluasi.
2. Menerima pesan ulama. Seorang pemimpin mesti senang bergaul dengan para ulama" dan menerima nasehat mereka. Tapi ia perlu waspada akan ulama" alsu" (ulama culas), yang hanya menginginkan kekayaan duniawi.
3. Berlaku baik kepada bawahan. Secara garis besar dapat di kemukakan di sini bahwa seorang pemimpin (kepala negara) yang hanya minat dan tekad untuk menegakkan keadilan, ia mesti mengatur dan mengarahkan para petugas dan pegawainya kepada keadilan. Ia mesti mengatur dan mengawasi keadaan mereka, keluarga dan anak-anak mereka, juga rumah dan tempat kediaman. Namun pengawasan ini tidak akan efektif, kecuali sang pemimpin telah lebih dulu berlaku adil dan memelihara dirinya. Misalnya, tekanan emosi dan amarahnya.

4. Tidak mengalahkan rasionalitas dan agamanya. Demikian pula rasionalitas dan agamanya tidak tunduk kepada emosi dan amarahnya, akan tetapi emosi dan amarahnya tunduk pada rasio dan agama.
5. Rendah hati dan penyantun. Janganlah berhati takabur dan bersikap sombong. Kepala negara haruslah merasakan dirinya sama dengan para rakyat biasa di dalam segala hal.
6. Tidak mementingkan diri sendiri. Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada anda. Menanggapi hal ini, anda mesti mengandaikan diri anda sebagai salah satu seorang rakyat biasa dan orang lain sebagai pemimpin anda. Segala hal yang tidak anda sukai untuk diri anda sendiri, maka ia juga tidak disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam. Jika anda menyukai sesuatu untuk mereka yang tidak anda sukai sendiri, sungguh anda telah berkhianat dan menipu rakyat anda.
7. Loyalitas tinggi. Tidak sepatutnya baginda mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu baginda untuk suatu keperluan. Waspadalah anda dari kemungkinan buruk ini. Jika seorang telah datang kepada anda untuk suatu kepentingan, maka janganlah anda menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadah sunnah sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam jauh lebih utama dibanding ibadah sunnah.
8. Hidup sederhana. Seorang kepala negara harus dapat mengendalikan dorongan hawa nafsu seperti mengenakan pakaian mewah dan makanan yang lezat-lezat. Semesti bersikap qona'ah (menerima apa adanya) dalam segala hal. Karena tidak ada keadilan tanpa sifat qona'ah.

9. Lemah lembut. Jauhilah sifat-sifat yang keras dan kasar, selama sifat lemah lembut dan bijaksana masih dapat dilakukan.
10. Cinta rakyat. Hendaklah kepala negara berusaha untuk membuat rakyat senang dan rela, sesuai dengan tuntutan dan kehendak agama. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya: “sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan aku kau pun mencintai mereka. Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang membenci kalian, dan kalian pun membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian pun turut mengutuk mereka”.
11. Tulus dan ikhlas. Setiap penguasa dilarang mencari kesenangan seseorang dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sebab seseorang yang benci atau murka karena ada sesuatu yang berlawanan dengan syara’, maka kemurkaannya tidak dipandang bahaya. Umar Ibnu Khattab pernah berkata, “suatu hari, hampir separuh penduduk berada dalam kebencian. Dan tentu saja orang yang dituntut untuk menyerahkan hak orang lain darinya akan murka, sementara dalam suatu kasus tidak mungkin memenangkan kedua-keduanya (kedua belah pihak yang sedang terlibat sengketa). Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ridho Allah, hanya karena mencari ridho manusia.”²⁹

²⁹Imam Ghazali, *Al Tibr al- Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyah, t.th), hal.181

D. Tanggung Jawab Pemimpin

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*), termasuk diantaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik. Tugas yang diamanahkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana, karena itu pula dalam menunjuk seorang pemimpin bukanlah berdasarkan golongan dan kekerabatan semata, tapi lebih mengutamakan keahlian, profesional dan keaktifan.

Kepemimpinan disatu sisi dapat bermakna kekuasaan, tetapi disisi lainjuga bisa bermakna kekuasaan, tetapi disisi lain juga bisa bermakna bertanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. Mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya.

Kita merasakan urgensi dan pentingnya pemimpin yang efektif melalui beberapa poin, salah satunya ialah kepemimpinan harus ada dalam kehidupan sehingga kehidupan bisa teratur dengan rapi, keadilan bisa ditegakkan dan kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah bisa dihalang-halangi. Serta menyesuaikan diri dengan perbuatan yang ada disekitarnya dan

memanfaatkan perubahan untuk kepentingan organisasi. Mengembangkan, melatih dan menjaga anggota.³⁰

Dalam Islam hampir semua ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah yang setiap saat harus dipertanggung jawabkan. Amanah itu diperoleh oleh Allah SWT lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia, kecuali para Nabi dan Rasul yang langsung dipilih oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam melaksanakan amanah, manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri, atau memasukkan diri menjadi pemimpin demi keuntungan semata.

Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanah yang harus diberikan kepada orang-orang yang benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram.

Disamping itu pemimpin juga harus orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. Karena ketaqwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertaqwa dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Karena dalam

³⁰As-Suwaitan, Thariq Muhammad dan Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hal.53-60.

terminologinya, taqwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Taqwa berarti taat dan patuh, yakni takut melanggar atau mengingkari dari segala bentuk perintah Allah SWT.

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah:³¹

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang mapan, dan *ijma*“ generasi salaf. Jika muncul pembuat *bid’ah*, atau orang yang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindung dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang perkara, dan menghentikan perseteruan diantar kedua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian kaum tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa berkerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

³¹Imam Al-Mawardi, hal. 201

5. Melindungi daerah-daerah dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh, hingga musuh tidak mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
6. Menerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya didakwahi hingga masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin, agar hak Allah SWT terealisasi, yaitu kemenanganNya atas seluruh agama.
7. Mengambil fai (harta yang didapat kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual dan ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal tanpa berlebih-lebihan, kemudian tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur mengurus masalah keuangan agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat. Allah SWT berfirman, “Hai

Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi, maka berilah keputusan perkara diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah SWT

Selain menjalankan kewajiban diatas, kewajiban secara umum, antara lain³²:

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Mengajak umat agar beribadah kepada Allah dan memberantas kesyirikan.
3. Berbuat adil, sesuai dengan firman Allah (QS. An-Nisa (4) ayat 58).
4. Melaksanakan hukum Allah, sesuai dengan firman Allah (QS. AlAn'am (6) ayat 114).
5. Menasehati masyarakatnya.

Pemimpin berkewajiban menasehati masyarakatnya, agar kembali ke jalan yang benar untuk memperoleh maslahat dunia dan akhiratnya. Rakyat akan mudah taat kepada pemimpinnya dan hendaknya pemimpin menunaikan amanah, karena orang yang taat kepada Allah akan disegani oleh umat.

³²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 248

BAB III

RIWAYAT HIDUP AL MAWARDI DAN HASAN AL BANNA

A. Biografi Al Mawardi

1. Riwayat Kehidupan Al Mawardi

Nama lengkap Imam al-Mawardi adalah Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Beliau merupakan ilmuan muslim yang lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad), pada 364 H/975 M.³³ Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Sedangkan sebutan al-Syafi'i karena beliau salah satu tokoh besar yang bermazhab Syafi'i.³⁴

Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.³⁵

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 5

³⁴ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017): 157-176.

³⁵ *Ibid*

2. Latar Belakang Pendidikan Al Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al- Azdi dan Muhammad bin Udai al- Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keIslaman dari ulama ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad.

Al-Mawardi menerima pendidikan di Basrah dan belajar yurispendi dari hukum Syafi'i, lalu dia melanjutkan ke Baghdad untuk pendidikan yang tinggi, terutama mempelajari yurisprudensi, tata bahasa dan sastra, ia memutuskan untuk berguru ilmu hukum, tata bahasa, dan sastra pada Syekh Abdul Hamid al- Isfraini dan Abdullah al-Bafi³⁶.

Dan Al-Mawardi juga belajar Hadits dan Fiqih pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, seorang pakar hadits dan bahasa di zamannya, dan Abi al-Qasim Abdul Wahid bin Muhammad al-Sumairi, seorang hakim di Basrah pada saat itu. Setelah itu Al-Mawardi menjadi ahli studi Islam, termasuk hadits, yurisprudensi, tata bahasa dan sastra. Ia dikenal sebagai

³⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* edisi Indonesia (Jakarta:Qisti Press 2014) hal.1

tokoh terkemuka madzhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pejabat tinggi pada pemerintahan dinasti Abbasyiah.

Masa kekhalifahan Abbasyiah adalah masa keemasan peradaban Islam. Kekhalifahan Abbasyiah yang gemilang telah memberikan suasana paling cocok bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Cendekiawan Muslim dari seluruh dunia berkumpul di istana Abbasyiah dan menyumbangkan pengetahuan mereka untuk memperkaya dunia ilmu pengetahuan.

Saat itu cendekiawan yang memberi sumbangan terbesar bagi ahli politik dan ekonomi adalah Al-Mawardi yang sekarang dianggap sebagai ilmuwan besar dalam politik dan ilmu politik. Perkembangan intelektualitas selama era ini sangat luar biasa dan yang termaju selama sejarah Islam. Sebagai salah satu tokoh intelektual besar di masanya, Al-Mawardi terkenal sebagai ahli politik Islam pertama, dan sejajar dengan politik besar abad pertengahan, yakni Nizam al-Mulk, Ibnu Khaldun dan Machiavelli.³⁷

Imam Al-Mawardi diusia dewasa menjadi Qadi (hakim agung) pada masa pemerintahan khalifah Abbasyiah (berkuasa pada tahun 381 H/ 991 H- 423 H/ 1031 M). Ia menjabat qadi diberbagai tempat, kemudian diangkat sebagai hakim agung (*qadi al-qudat*) di Ustuwa dan penasihat khalifah.³⁸ Pada 429 H, ia dinaikkan ke jabatan kehakiman yang paling tinggi, *Aqb al-qudat* (qadi agung) di baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya.³⁹

³⁷Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam As-Shulthaniyyah* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h.22

³⁸Eksiklopedi Tematis Dunia Islam, *Pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998) hal.276.

³⁹Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) hal.163

Adapun guru-guru beliau di antaranya yaitu Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari, Muhammad bin Udai al-Minqari, Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili, Muhammad bin al-Ma'alli al-'Azdi, Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini, dan Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi.

Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, di antaranya Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadil, al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad, Ali bin Sa'id bin Abdurrahman, Mahdi bin Ali al-Isfiraini, Ibnu Khairun, Abdurrahman bin Abdul Karim, Abdul Wahid bin Abdul Karim, Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya, dan Ahmad bin Ali bin Badrun dan Abu Bakar al-Khatib.

Sebagai ulama yang luas ilmunya, beliau telah menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu fikih, tafsir, politik Islam, akidah dan lainnya. Hal ini terbukti dengan beberapa karya yang beliau tulis, di antaranya yaitu:⁴⁰

1. Al-Hawī al-Kabīr, dalam bidang fikih.
2. Al-Iqnā'ū , dalam bidang fikih
3. Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah, dalam bidang politik dan pemerintahan.
4. Siyāsah al-Wizārah wa Siyāsah al-Malik, dalam bidang politik.
5. Taṣīl al-Nazār wa Ta'jīl al-Ẓafar fī Akhlāq al-Malik, dalam bidang politik.
6. Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, dalam bidang tafsir.
7. Al-Nukah wa al-'Uyūn, dalam bidang tafsir.

⁴⁰Rashda Diana, *"Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam....."*hal. 157-176

8. *Al-Amsāl wa al-Hikām*, dalam bidang tafsir.

9. *Adāb al-Dunya wa al-Dīn*, dalam bidang sastra.

A'lām al-Nubuwwah, dalam bidang akidah. Al- Mawardi adalah termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, hadits, tafsir, fiqih dan ketatanegaraan.⁴¹ Salah satu bukunya yang terkenal, termasuk di Indonesia adalah *adab al-Dunya wa al-Din* (Tata Krama Duniawi dan Agamawi).

Secara garis besar, karya-karya Al-Mawardi dapat dikelompokkan dalam tiga cabang, yaitu keagamaan, sosio-politik, dan kebahasaan dan kesastraan berikut diterakan sejumlah karyanya baik yang sudah pernah dicetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip yang disimpan disejumlah perpustakaan atau museum.⁴²

a. Dalam Bidang keagamaan

- 1) *Kitab al-Tafsir* yang dikenal juga dengan nama *al-Nukat wa al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'an al- Karim*.
- 2) *Adab al-Din wa al-Dunya*.
- 3) *Al-Hawi al-Kabir*
- 4) *Kitab al-Iqna*
- 5) *A'lam al-Nubuwwah*
- 6) *Adab al-qadi*

⁴¹ Munawwir Sjazdali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal.59.

⁴² Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, (Surabaya:Pustaka Progresif,2000), hal.24.

b. Bidang Sosial Politik

- 1) *Al-Ahkam al- Sulthaniyyah wa al- Wilayat al-Diniyyah*
- 2) *Nasihah al-Mulk*
- 3) *Tashil al- Nadzar wa Ta'jil al-Dzafir.*
- 4) *Qawain al- Wizaroh wa Siyasah al-Mulk.*

c. Bidang Bahasa dan Kesastraan

- 1) *Kitab fi al-Nahwu*
10. *Al-Amtsal wa al-Hikam*

3. Kondisi Sosial Politik pada Masa al-Mawardi

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, al-Mawardi hidup pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Yaitu dinasti dimana kejayaan dan keilmuan Islam berkembang pesat. Namun, khusus pada masanya, telah terjadi kemunduran kemunduran di berbagai bidang. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah, dan kekuasaan hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan nyata berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika al-Mutawakkil berkuasa. Beliau adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat.⁴³

⁴³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.62.

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhirabad ke-10 sampai pertengahan abad ke11 M. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal.

Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah.

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan tidak mesti dari suku Quraisy.

Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat wazir atau tawfiz atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan.

Jika diperhatikan pendahuluan buku al-Aḥkām al-Sultāniyyah karangan al Mawardi, terlihat bahwa karya itu ditulis atas permintaan seorang yang berkuasa. Namun tidak dijelaskan secara rinci terkait penguasa tersebut. Akan tetapi, sangat besar kemungkinan orang yang memintanya itu adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Sebenarnya, kitab yang berjudul al-Aḥkām al Sultāniyyah tidak hanya ditulis oleh al-Mawardi, tetapi juga ditulis oleh Al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra'. Perbedaannya terletak pada muatan isinya. Dalam kitab al Mawardi, diarahkan pada pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan dalam kitab Abu Ya'la diarahkan pada mazhab Hanbali. Perbedaan kitab tersebut juga dalam hal penggunaan istilah-istilah tertentu. Misalnya, istilah ahlul halli wal aqdi yang dipakai al-Mawarid untuk menunjukkan makna orang yang menjabat sebagai pengatur birokrasi pemerintahan, sedangkan istilah ahlul ikhtiyar dipakai oleh Abu Ya'la untuk menunjukkan makna yang sama.⁴⁴

Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari pada zaman Farabi, dan bahkan lebih parah. Semula baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negara serta dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam.⁴⁵

⁴⁴Siti Mahmudah, "Rekonstruksi Syari'at Islam: Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011): 24

⁴⁵Munawwir Sjazdali, *Islam dan Tata Negara*(Jakarta: UI Press, 1993), hal.58

Tetapi kemudian lambat laun cahaya yang gemerlap itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tunggu dan panglima non Arab itu makin meningkat, waktu itu belum tampak adanya usaha dipihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan khalifah yang berkebangsaan Turki dan Persia.

Namun demikian, mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang bukan Arab dan tidak dari suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana yang dapat diperkirakan kemudian menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat *wazir tafwidh* atau penasihat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebiaksanaan. Al-Mawardi adalah salah tokoh utama dari golongan terakhir ini.⁴⁶

Sebenarnya kondisi politik pada saat itu jika kita amati secara sekilas ketika itu dunia Islam terbagi ke dalam tiga negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain, di Mesir terdapat negara Fatimiyyah. Di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah. Di Irak Khurasan, dan daerah-daerah Timur secara umum terdapat negara Bani Abbasyiah, hubungan antara khalifah-khalifah Bani Abbasyiah dengan negara Fatimiyyah di Mesir

⁴⁶*Ibid.* hal.59

didasari permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain. Hubungan Bani Abbasyiah dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbasyiah meruntuhkan sendi-sendi negara Bani Umayyah, dan untuk itu darah tercecceh disana sini.

Itulah kondisi eksternal negara Bani Abbasyiah, adapun kondisi internal khalifah di Baghdad dan sekitarnya, sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di baghdad adalah Bani Buwaih, mereka adalah orang-orang Syiah fanatik dan radikal. Mereka berkuasa dengan menekan ummat, dan khalifah sendiri tidak mempunyai peran penting yang bisa disebutkan disini, bahkan ia adalah barang mainan ditangan mereka. Mereka melemparkannya seperti bola, jika mereka tidak menyukai khalifah, mereka langsung memecatnya.⁴⁷

Al-Mawardi tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam. Karena, pada saat itu kekhalifahan Bani Abbasiyah telah banyak terpecah-pecah, selain ada juga pemerintahan lain yang berada di Mesir, yaitu dari Bani Fathimiyah, kemudian ada juga di Turki. Motif penolakan ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir. Ia menilainya sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap

⁴⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkamus Shulthaniyah , Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* ,edisi indonesia (Jakarta:Qisti Press ,20014) hal.27.

kekuasaan bani Abbasiyah di Baghdad.⁴⁸ Untuk itu, menurut al-Mawardi, dalam suatu negara Islam hanya ada satu pemimpin atau khalifah.⁴⁹

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya, maka al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan sistem kekhalifahan dalam pemerintahan Islam. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa wazir tafwiz (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, yaitu dari keturunan Quraisy.

B. Biografi Hasan Al Banna

1. Riwayat Kehidupan Hasan Al Banna

Nama lengkapnya Hasan Al-Banna adalah Syekh Hassan Ahmad Abdel Rahman Muhammad al-Banna. Dia dilahirkan di kota Mahmudiyah, Distrik Buhairah, Iskandariyah, Mesir pada bulan Oktober tanggal 14 tahun 1906 M⁵⁰. Istri dari Hasan al-Banna bernama Latifa Hussein al-Soli dan beliau mempunyai sembilan orang anak yaitu : Ahmed Seif al-Islam, Wafa al-Banna, Ahmad Saif al-Islam al-Banna, Istishad al-Banna, Hala al-Bana, Muhammad Saif al Dine al-Banna, Rajaa' al-Banna, Sanaa' al-Banna, Safaa' al-Banna. Orang tua beliau adalah seorang ulama besar pada masanya, yaitu Syaikh Ahmad bin Abdur Rahman bin Muhammed al-Banna,

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal.277

⁴⁹ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah...*, hal.48

⁵⁰ Farid Nu'man, *Ikhwanul Muslimin Anugrah Allah yang Terdzholimi* (Depok:Pustaka Nauka,1993). hal. 137

yang banyak berkarya di bidang Ulumul Hadits, dan mengajarkan ilmu Fiqih, Tauhid serta hafalan Al-Qur'an berikut tajwid.

Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab "Al-Fath Ar Rabbany li Tartib Musnad Al-Imam Ahmad". Disamping menulis kitab-kitab hadits, beliau juga bekerja memperbaiki jam (yang banyak dikenal dengan sebutan as-Sat'i). Syaikh Ahmad mengaar Fiqih empat madzhab dan kitab-kitab *sunan*. Dia(ayahnya)mengaar kita *Muwatha'* Imam Malik, *Musnad* Imam Syafi'i serta menyusun beberapa buku,antara lain *Bada'i'u al Minan fi jam'i wa tartibMusnad al Syafi'i wa al sunan*, sekaligus memberi *tahqiq* dan *syarahnya*. Ia juga menyusun satu juz di antara kitab empat Imam *Musnad*, juga menyusun *Musnad* Imam Ahmad dengan judul *Fath al Rabbany fi Tarib Musnad al Imam Ahmad al Syaibany*.

Syaikh Ahmad menikah dengan seorang wanita dari keluarga Abu Qaura dan dikarunia lima anak laki-laki dan dua anak perempuan, Hasan Al-Banna merupakan anak sulung.⁵¹ Hasan Al-Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga Islam yang taat. Sebagai seorang ayah, Syaikh Ahmad mencita-citakan putranya(Hasan)sebagai mujahid(pejuang) disamping seorang mujaddid(pembaharu).⁵²

⁵¹ Abbas Assisi, *Biografi Dakwah Hasan Al-Banna*, terj. Nandang Burhanuddin (Bandung:Harokatuna Publishing,2006),hal.382-383.

⁵² Richard Paul Michell,*masyarakat Al Ikhwanul Muslimin Gerakan Dakwah Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*,terj. Safrudin Edi Wibowo (Jakarta: Guana,2002) hal.4.

Abdurrahman Al-Banna, adik kandung dari Hasan Al-Banna pernah bercerita tentangnya. Ketika itu Hasan berusia 9 tahun dan aku 7 tahun, kami selalu bersama-sama pergi ke *maktab* (perpustakaan) untuk menghafal Al-Qur'an dan menulis di papan. Ia sudah hafal dua pertiga Al-Qur'an sedangkan aku baru sepertiga, dari surah al-Baqarah sampai At-Taubah.

2. Latar Belakang Pendidikan Hasan Al Banna

Hasan Al-Banna memulai pendidikan di Madrasah Diniyah al-Rasyad saat berusia delapan tahun. Madrasah Diniyah Al-Rasyad ini bisa dikatakan istimewa dalam bidang materi yang diajarkan dan metodologi yang diterapkan. Di madrasah itu juga diajarkan hafalandan pemahaman hadits serta pola pengajarannya juga sangat bagus. Pemilik dari Madrasah ini bernama Syaikh Muhammad Zahran dan termasuk diantara orang-orang pertama setelah ayahnya yang mempengaruhi perkembangan pemikiran Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna belajar di Madrasah ini sampai berusia Dua belas tahun.

Karena kesibukannya Syaikh Muhammad Zahran, ia menyerahkan pengelolaan madrasah kepada ustadz-ustadz lain yang menurut Hasan Al-Banna tingkat keilmuan, kekuatan ruhani, serta akhlak ustadz-ustadz itu kurang setara dengan Syaikh Muhammad Zahran, Hal inilah yang membuat Hasan Al-Banna memutuskan untuk pindah ke Madrasah I'dadiyah, setingkat dengan Madrasah Ibtidaiyah.

Pada tahun 1923, saat Hasan Al-Banna berusia 16 Tahun ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Madrasah Mu'allimin dan pada tahun yang sama ia masuk kedalam Darul Ulum Kairo. Darul Ulum didirikan pada tahun 1873M sebagai lembaga pertama di Mesir yang menyediakan pendidikan tradisional dan klasik Al-Azhar. Dar al Ulum menjadi sekolah tinggi keguruan yang utama, dan dengan berkembangnya sistem universitas sekuler di Mesir, Al-Azhar menjadi semakin bertambah tradisional.⁵³

Dalam lingkungan pendidikan tersebut Hasan Al-Banna mampu mengorganisasikan kelompok mahasiswa Al-Azhar dan Dar al Ulum yang melatih diri menjadi khotbah di masjid-masjid. Dalam kesempatan belajar di Kairo, Hasan Al-Banna sering berkunjung ke toko-toko buku yang dimiliki oleh gerakan Shalafiyah pimpinan Rasyid Ridha, dan aktif membaca *al Manar* dan berkenalan dengan murid-murid Abduh ainnya.⁵⁴

Hasan Al-Banna menamatkan pendidikan di Dar al Ulum pada tahun 1927 dalam usia 21 tahun kurang beberapa bulan. Hasan Al-Banna di minta Departemen Pendidikan untuk mengajar di Ismaliyah. Awalnya Hasan Al-Banna ragu dengan tugas tersebut, atas dorongan ayah dan guru-gurunya, Hasan Al-Banna memutuskan untuk bersedia menerima tawaran itu.⁵⁵ Pada tanggal 19 september tahun 1927 ia meninggalkan Kairo menuju Ismalia untuk menepati rumah baru dan melaksanakan tugas yang baru pula sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri.⁵⁶

⁵³Richard Paul Mitchell, *Masyarakat Al-Ikhwani Muslimin :Gerakan Dakwah Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*, (Jakarta: Buana Press, 2003)hal.5-6

⁵⁴ Abdul Khalik dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hal.254.

⁵⁵ Hasan Al-Banna, *Memoar Hasan Al-Banna (Solo:Media Insani Press) h, 102-103*

⁵⁶*Ibid*, hal.105

3. Kondisi Sosial Politik pada Masa Hasan Al Banna

Selama abad kesembilan belas, nasib baik politik Mesir semakin erat dengan Eropa, selama awal tahun 1800-an hubungannya semakin dekat karena para investor Eropa mendukung berbagai proyek untuk mengembangkan infrastruktur Mesir, proyek terpenting adalah pembangunan Terusan Suez, yang selesai pada tahun 1869, selain memodernasikan ekonomi Mesir, berbagai proyek ini juga membuat Mesir berhutang kepada kreditor Eropa. Hingga abad dua puluh Inggris masih tetap bertahan dan mendominasi seluruh sektor yang ada di Mesir. Hasan al-Banna yang berusia tiga belas tahun, ikut berdemonstrasi menuntut kepergiaan Inggris, Inggris menghadapi badai protes nasionalis, dengan demikian, iklim politik diseperti tahun-tahun awal kesadaran sosial Hasan al-Banna ditandai dominasi asing dan perlawanan terhadap dominasi asing.⁵⁷

Pada marhalah *Dar al-Ulum* telah terjadi banyak peristiwa denotatis, diantaranya peristiwa runtuhnya dinasti Kamal dan posisi dunia Islam diambang kehancuran, dengan mata kepalanya sendiri Hasan al-Banna menyaksikan pergolakan yang maha dahsyat antara masyarakat tak bersenjata dengan kaum kolonial yang durjana, Hasan al-Banna menilai hal ini bukan hanya sekedar masalah invisi Inggris terhadap Mesir, tetapi lebih dari itu merupakan *pencaplokan* Barat terhadap dunia Islam.⁵⁸

Posisi al-Azhar pada saat itu sangat lemah. Kekuatan Islam baru bisa digalang dan disatukan dalam wadah yang diberi nama Asy-Syubban al-

⁵⁷ Zet Book Ltd, 7 Chntya Street, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, edisi Indonesia (Bandung: Mizan, 2005), cet 3, hal. 27.

⁵⁸ Dr. Anwar Al-Jundi, *Biografi Hasan Al-Banna*, Mediasi Insani Publishing (Jakarta: Wisata, 2006) hal. 39

Muslimin, atau jama'ah-jama'ah yang lain. Akan tetapi Hasan al-Banna bermaksud menghadapi masalah tersebut dengan serius dan berbeda. Ia memulainya dengan wacana persatuan Islam (al-Jami'yyat al-Islamiyyah), tetapi untuk tahap pertama ia konsentrasikan pada bidang sejarah gerakan kebangkitan Islam, juga pembangunan pemuda dan penggalangan kekuatan.⁵⁹

Beberapa bulan setelah kepindahannya ke Ismailiyyah tempat ia bekerja sebagai guru pada sekolah lanjutan miik pemerintah, Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tanggal 20 maret 1928 di kota Ismailiyah Bersama dengan keenam temannya dan murid-muridnya yang setia. Maka mulailah Hasan l-Banna dengan Dakwahnya, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk memberantas kejahiliyahan (kebodohan). Pada tahun 1933, Hasan al-Banna memindahkan markas besar Ikhwan dari Ismailiyyah ke Kairo. Selama tiga berikutnya pergerakan tersebut memusatkan kegiatan-kegiatannya dalam mendidik masyarakat agar mereka hidup secara Islamis, dan memantapkan rencana kerja masjid-masjid, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Mesir. Pada tahun 1949 *Ikhwanul Muslimin* sudah memiliki lebih dari dua ratus ribu cabang yang tersebar di seluruh pelosok Mesir dengan anggota sekitar lima ratus ribu ditambah simpatisan yang banyaknya diperkirakan sama dengan anggotanya. Lambat laun *Ikhwanul Muslimin* berkembang menjadi suatu organisasi keagamaan dan politik yang amat tangguh.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.* hal.41

⁶⁰ Munawwir Sjazdali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hal.145

Akhirnya *Ikhwanul Muslimin* terlibat secara langsung dalam pergolakan politik di Mesir lewat kegiatan-kegiatannya menentang kekuasaan pendudukan Inggris dan berdirinya negara Israel di atas bumi Palestina. Aspirasi politiknya juga makin terkristalisasi, yakni secara jelas mendambakan negara Islam.⁶¹ Surat kabar, pamflet majalah dan buku-buku yang mereka terbitkan sirkulasinya semakin hari semakin meningkat, kini pengaruh *Ikhwanul Muslimin* mulai menembus batas-batas negara, karena para remaja di negara-negara tetangga semakin banyak yang mengharapkan bimbingan dari Hasan al-Banna.

Didirikanlah cabang-cabang di Syiria, Libanon, Yordania, Palestina, Maroko dan Sudan. Seperti halnya Jamaluddin al-Afghani, Syeikh Hasan al-Banna menyadari bahwa tidak mungkin bagi suatu masyarakat Islam untuk mendapatkan kemajuan dibawah kekuasaan asing yang memusuhinya. Karena itu ia menyerukan agar memasang bendera jihad sampai titik darah penghabisan melawan imperalisme Inggris, baik secara politis maupun ekonomis.

Ia menuntut kepada kerajaan Inggris Raya agar melepaskan Terusan Zues. Karena popularitasnya dan pengaruhnya semakin besar, golongan penguasa yang sedang memerintah mulai menganggap *Ikhwanul Muslimin* sebagai suatu ancaman *subversive* yang paling berbahaya. Tahun 1941, Perdana Menteri dan pemerintahan Mesir sangat terpengaruh oleh Inggris. Pemerintah Mesir, di bawah kepemimpinan perdana menteri, bergabung dalam pasukan Inggris di perang dunia II. Hasan al-Banna menentang aliansi

⁶¹ *Ibid.* Hal.146

ini, tetapi dia tidak didengar, dia kemudian ditangkap dan surat kabarnya ditutup.

Akan tetapi rakyat bangkit dalam pemberontakan dan pemerintah terpaksa membebaskannya. Tahun 1942, Nasha Pasha menutup semua kantor *Ikhwanul Muslimin*, kecuali kantor pusatnya di Ismailiyyah, tetapi rakyat memberontak dan Nasha Pasha digulingkan. Di tahun 1945, Perdana Menteri baru disumpah dan diadakan pemilihan umum. Dalam pemilu ini, Hasan al-Banna dan rekan-rekannya mengambil bagian, tetapi akibat campur tangan pemerintah, kandidat ikhwan tidak terpilih dan Hasan al-Banna ditangkap lagi, tetapi protes menyebar luas dan dia dibebaskan.

PBB pada tahun 194, dibawah pengaruh Amerika Serikat memutuskan untuk membentuk negara Israel di Palestina. Mengenai hal ini, Hasan al-Banna dan rekan-rekannya mendeklarasikan Jihad melawan agresi dan mulai mengorganisir dari menjadi pasukan mujahidun yang kuat. Mereka berpartisipasi dalam jihad ini dan berjuang menentang pembentukan negara baru Yahudi, tetapi seluruh Barat berada dibelakang mereka.

Pilihan pada bulan Desember 1948, pemerintah melakukan penekanan ala Inggris dan menyatakan bahwa pergerakan tersebut dianggap tidak sah. Beribu-ribu Ikhwan dijebloskan kepenjara dan harta kekayaan mereka disita negara, juga pada tahun ini Perdana Menteri Mahmud yang melihat popularitas Ikhwanul Muslimin merasa cemas dan dia menangkap semua pendukung partai ketika mereka berperang melawan Israel.

Ribuan pejuang Ikhwan di seluruh Mesir di masukan ke dalam penjara. Karena alasan politik, Syeikh Hasan al-Banna tidak ditangkap, tetapi partainya dilarang dan dia mendapat pengawasan ketat. Pada 12 Februari 1949, ketika dia pulang dari sebuah pertemuan Young Muslim Association, dia ditembak mati. Peristiwa pembunuhan itu sangat kejam dan mengejutkan, tak ada yang mengizinkan mendekati tubuhnya kecuali ayahnya, jenazahnya diperbolehkan pulang dengan kawalan polisi, tidak ada yang boleh menyalatkan Hasan al-Banna kecuali ayahnya.⁶² Polisi tidak memperbolehkan masyarakat umum mendekati peti matinya. Semua saudara berada dipenjara, sedang ibu dan dua saudara perempuan, putri-putrinya dan putranya Ahmad Saif al-Islam di rumah.⁶³

C. Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Letak Geografis

Kecamatan Sungai Kanan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Kota Pinang, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Halongonan Kabupaten Paluta, sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta dan Kecamatan Torgamba, sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta. Luas daerah Kecamatan Sungai Kanan 48.436 Km².

⁶²Ahmad Isya 'Asyur, *Ceramah-Ceramah Hasan Al-Banna, Hadits Tsulatsa*', Cet V(Solo:Era Intermedia,2005), Hal.9

⁶³M. Atiqul Haque, *100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia* (Bandung:Pictures,2003)hal.378

Adapun sumber daya alam di Kecamatan Sei Kanan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil tambang galian di daerah Kecamatan Sungai Kanan terdapat penggalian batu kerikil yang diambil dari sungai kemudian diangkut dan dipergunakan di dalam maupun di luar Kecamatan Sungai Kanan.
- 2) Hasil hutan, di Kecamatan Sungai Kanan tidak lagi memiliki hutan karena telah diganti menjadi daerah perkebunan

2. Penduduk Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan

Secara Geografi Labuhanbatu Selatan adalah satu wilayah Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kopi Pinang. Kecamatan Sungai Kanan berada diujung batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Paluta dengan Topografi datar dan luas 484,35 km² dan jumlah penduduk sebanyak 53.669 jiwa dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 27.497 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 26.172 jiwa.

Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 9 kelurahan yaitu: Langga Payung, Sabungan, Hajoran, Huta Godang, Sampean, Marsonja, Parimburan, Ujung Gading, dan Batang Nadenggan. Pada tahun 2017 Kecamatan Sungai Kanan Terbagi menjadi 11 Kelurahan Langga Payung, Sabungan, Persiapan Sabungan Hilir, Persiapan Sabungan Hulu, Hajoran, Huta Godang, Sampean, Marsonja, Parimburan, Ujung Gading, dan Batang Nadenggan.

Suku-suku yang ada di Kecamatan Sungai Kanan terdapat 5 Suku yaitu: Suku Batak, Suku Jawa, Suku Aceh, Suka Nias dan Suku Melayu. Mata pencaharian di Kecamatan Sungai Kanan yaitu : Petani Kelapa Sawit, Petani Karet, Petani Sawah atau Padi dan Berdagang. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sungai Kanan beragama Islam yaitu sebanyak 97,16%/, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 2,17%, Kristen Khatolik sebanyak 0,64% dan Hindu sebanyak 0,2%.

Adapun data penduduk Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.1.

NO	DESA/ KELURAHAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			s/d JUNI 2018		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Langga Payung	6.063	6.039	12.102	6.913	6.761	13.674	7.128	6.971	14.099
2	Sabungan	6.131	6.351	12.482	4.363	4.273	8.636	1.830	1.877	3.707
3	Hajoran	3.094	3.115	6.209	3.015	3.195	6.210	3.001	2.940	5.941
4	Huta Godang	3.898	4.132	8.030	3.522	3.865	7.387	3.208	3.143	6.351
5	Sampean	2.177	2.054	4.231	2.240	2.195	4.435	2.286	2.239	4.525
6	Marsonja	1.099	1.058	2.157	1.083	1.066	2.149	1.119	1.098	2.215
7	Parimburan	2.042	1.871	3.913	2.144	2.099	4.243	2.177	2.132	4.309
8	Batang Nadenggan	2.522	2.583	5.135	2.500	2.525	5.025	2.265	2.152	4.417
9	Ujung Gading	1.153	1.166	2.319	1.244	2.099	3.343	1.271	1.244	2.515
10	Sabungan Hilir	-	-	-	-	-	-	1.199	1.210	2.409
11	Sabungan Hulu	-	-	-	-	-	-	2.013	1.168	3.181
	Jumlah	28.209	28.369	56.578	27.024	28.078	55.102	27.497	26.172	53.669

3. Aparatur Desa/ Kelurahan pada Kecamatan Sungai Kanan

Kecamatan Sungai Kanan membawahi 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa defenitif dan 2 (dua) Desa Persiapan sebagaimana tertulis pada tabel dibawah ini:⁶⁴

Tabel 3.2.

No	Desa /Kelurahan	Nama Kepala Desa / Kepala Kelurahan	Pendidikan
1.	Kelurahan Langga Payung	Muhammad Ali Ibrahim, S.STP	S1
1.	Desa Sabungan	H.Gulmat	SLTA
2.	Desa Persiapan Sabungan Hilir	Pj. Masniari Tarihoran	S1
3.	Desa Persiapan Sabungan Hulu	Pj. Saifullah	SMA
4.	Desa Hajoran	Kayamuddin Siregar	SLTA
5.	Desa Huta Godang	Akhir Sakban Siregar	SLTA
7.	Desa Sampean	Husnul Mubarak Batubara	SLTA
8.	Desa Marsonja	Budi Amin Tanjung, S.Pdi	S1
9.	Desa Parimbunan	Cantoan Siregar	SLTA
10.	Desa Batang Nadenggan	Drs. H. Bosi Api Rambe	S1
11.	Desa Ujung Gading	Herman Harahap	SLTA

⁶⁴Data bulan September Tahun 2018

4. Agama Penduduk Kecamatan Sungai Kanan

Adapun agama yang terdapat di kecamatan Sungai Kanan, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Budha. Dengan rekapitulasi penduduk menurut agama yang dianut:

Tabel 3.3.

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	52.476
2.	Kristen Protestan	1.020
3.	Kristen Katolik	172
4.	Budha	10
Jumlah		53.699

5. Sarana dan Prasana Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dan adapun rekapitulasi data sarana peribadatan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.

No.	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	121
2.	Mushalla	20
3.	Rumah Suluk	6
4.	Gereja	2
5.	Vihara	-
Jumlah		149

6. Jarak Wilayah

Berikut ini adalah jarak antara Ibukota Kecamatan Sungai Kanan dengan Desa/ Kelurahan se Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.

No	Desa /Kelurahan	Luas Wilayah		Jarak
		(Km ²)	%	
1.	Langga Payung	69,35	14,32	0
2.	Sabungan	65	13,42	8
3.	Hajoran	40	8,26	8
4.	Huta Godang	65	13,42	19
5.	Sampean	55	11,36	25
6.	Marsonja	50	10,32	28
7.	Parimburan	55	11,36	28
8.	Ujung Gading	40	8,26	16
9.	Batang Nadenggan	45	9,29	20

BAB IV

HUKUM LOYALITAS RAKYAT KEPADA PEMIMPIN MENURUT AL MAWARDI DAN HASAN AL BANNA

A. Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna

1. Pendapat Al Mawardi

Al-Mawardi menegaskan beberapa hal terkait teori politik mengenai imam, yang salah satunya hak Imam dan Khalifah. Menurut Al-Mawardi, jika imam telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak rakyat, rakyat wajib memenuhi dan mendukung Kebijaksanaannya.⁶⁵ Jika kepala negara telah menjalankan hak-hak ummat, lalu ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat ini kepala negara mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu taat kepada pemerintahnya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama ia tidak berubah keadaannya.⁶⁶

Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara ada dua hal:

- a. Kredibilitas pribadinya rusak;
- b. Terjadi ketidaklengkapan anggota tubuh.

⁶⁵Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, *pemikiran dan peradaban* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1991) hal.278

⁶⁶T.M. Hasbi Ash- Shiddiqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam* (Jakarta:Bulan Bintang, 1991) hal.117

Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan fasik. Hal itu disebabkan dua macam yaitu ia mengikuti syahwatnya dan mengikuti syubhat. Maka yang pertama yang berkaitan dengan itu adalah perbuatan tubuh, yaitu dengan melakukan kemungkar, mengikuti dorongan syahwat, dan menuruti hawa nafsunya. Ini adalah kefasikan yang menghalangi untuk menjabat kepala negara dan menuruskan jabatannya.⁶⁷ Hal yang kedua adalah berhubungan dengan akidah, yaitu melakukan takwil terhadap sesuatu masalah yang subhat sehingga ia menghasilkan takwil yang menyalahi kebenaran. Hak imam yang juga telah disebutkan di atas yaitu :

- a. *Haqq al-Thaah*, yaitu hak untuk memperoleh kepatuhan dari rakyatnya terhadap pemerintah (penguasa).
- b. *Haqq al-Nashrah*, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan dari rakyat dalam pelaksanaan tugas imam.⁶⁸

Hak yang pertama menunjukkan bahwa ketika seseorang telah di baiat menjadi seorang imam atau pemimpin, maka dengan sendirinya segala titah yang dikeluarkan menjadi kewajiban masyarakat untuk ditaati.⁶⁹ Menurut al-Mawardi mengenai pengangkatan kepala negara, salah satu tugas terpenting anggota lembaga pemilih (*ahl al-‘aqd wa al-halli* atau *ahl al-ikhtiyar*) adalah mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap kandidat kepala negara, apakah ia memenuhi persyaratan.

⁶⁷ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta:Gema Insani Press,1996) hal..39

⁶⁸ Rusdji Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta:Ar-Raniry Press,2004) h.47

⁶⁹ Mohd Mufid, *Politik Dalam Perspektif Islam* (Jakarta:UIN Jakarta Press,2004) hal.40

Menurut al-Mawardi, dari segi politik terdapat enam sendi utama, yaitu Agama yang dihayati, penguasa yang berwibawa, keadilan yang menyeluruh yang didalamnya menjelaskan keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, dan pengikut terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela serta loyalitas yang utuh, keamanan yang merata, kesuburan tanah yang berkesinambungan dan harapan kelangsungan hidup.⁷⁰

Dalam karya al-Mawardi yaitu Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam pada sub bab kewajiban yang harus dipenuhi oleh para mujahidin dalam berjihad, disana dijelaskan kewajiban tentara terhadap panglima perang, yaitu:

- a. Selalu taat kepada pemimpin dan tunduk dalam kekuasaannya karena kekuasaannya atas mereka sah serta mereka harus taat kepadanya sesuai status jabatannya itu, dan taat kepada pemimpin adalah wajib⁷¹. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁷⁰ Munawwir Sjazdali, *Islam Dan Tata Negara*(Jakarta:UI Press,1993) hal.62

⁷¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam, edisi Indonesia* (Jakarta:Darul Falah,2007) hal.86

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-nisa': 59)

- b. Menyerahkan wewenang dan mandat itu kepadanya untuk mengatur strategi perang mereka sehingga tidak banyak pendapat yang saling berbenturan, yang mengakibatkan persatuan mereka menjadi hilang dan mereka menjadi terpecah belah Allah SWT berfirman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja. (Q.S. An-Nisa': 83).

Penyerahan masalah itu kepada ulil amri adalah sebab bagi tercapainya ilmu dan kebijakan yang tepat. Jika ada sesuatu kebenaran yang tidak terlihat oleh panglima mereka, mereka hendaknya menjelaskannya kepadanya dan menunjukkannya. Oleh karena itu, dianjurkannya untuk musyawarah sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang tepat.

- c. Segera menjalankan instruksinya dan menaati larangannya karena kedua hal itu adalah dimensi utama ketaatan terhadapnya. Jika mereka tidak menjalankan apa yang ia instruksikan dan menjalankan apa yang ia larang,

ia dapat menghukum dan memberi pelajaran kepada mereka sesuai kadar pelanggaran itu, namun jangan sampai bertindak kasar. Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 159)

Al-Mawardi memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara, yaitu tidak berlaku adil dalam pemerintahan dan hilang kemampuan fisiknya, sikap tidak adil kepala negara dapat terlihat dari kecenderungannya memperturutkan hawa nafsu seperti melakukan hal-hal yang subhat.

2. Pendapat Hasan Al Banna

Hasan Al-Banna berkata, yang saya maksudkan dengan taat adalah menunaikan perintah dengan serta merta, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, saat bersemangat maupun malas.⁷²

⁷²Said Hawwa, *Membina Angkatan Mujahid, Study Analisis Konsep Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Risalah Ta'lim* (Solo:Intermedia,2002) hal.171

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: الْإِسْمَعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري والمسلم)⁷³

Artinya : menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada Yahya ibn Said dari Abdullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda: Setiap muslim wajib mendengar dan taat pada pemimpinnya dalam hal yang disenangi maupun tidak disenangi, kecuali jika diperintah untuk maksiat. Apabila diperintah untuk melakukan maksiat maka tidak ada mendengar dan taat (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Hasan Al-Banna menganggap ketaatan dan loyalitas seseorang anggota terhadap pimpinannya sebagai salah satu rukun bai'at. (Beliau memaknai taat ibarat pelaksanaan semua perintah dengan sesegera mungkin dalam segala kondisi baik senang, susah, sukarela maupun sedikit terpaksa). Beliau melanjutkan bahwa taat pun terbagi pada beberapa klarifikasi yang diukur dari sejauhmana tahapan pengkaderan seorang anggota, adapun tahapan-tahapannya, yakni:

1. Takrif. Pada tahap ini dilakukan dengan menyebarkan fikrah Islam di tengah masyarakat. Adapun sistem dakwah untuk tahap ini adalah sistem kelembagaan. Urgensinya adalah kerja sosial bagi kepentingan umum. Medianya adalah memberikan nasehat dan bimbingan (sekali waktu) dan membangun berbagai tempat yang berguna (di waktu yang lain), serta berbagai media aktivitas lainnya.

⁷³Muhammad Ibnu Ismail ibn Ibrahim al-Jufi al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut:Dar Ibnu Kasir, 1993M) no. 6762 hal.78

2. Takwin. Dalam tahapan ini dakwah ditegakkan dengan melakukan seleksi terhadap anasir positif untuk memikul beban jihad dan untuk menghimpun berbagai bagian yang ada. Dakwah pada tahapan ini bersifat khusus. Ia tidak dapat dikerjakan oleh seseorang kecuali yang telah memiliki kesiapan secara benar untuk memikul beban jihad yang lama masanya dan berat tantangannya. Slogan utama dalam persiapan ini adalah: “*totalitas ketaatan*”.
3. Tanfidz. Dakwah dalam tahapan ini adalah jihad dengan tanpa kenal sikap plin-plan, kerja terus menerus untuk menggapai tujuan akhir. Dan siap menanggung segala cobaan yang tidak mungkin bersabar atasnya kecuali orang-orang yang tulus. Dakwah ini tidak mungkin meraih keberhasilan kecuali dengan “ketaatan yang total juga”.

Hasan Al-Banna menulis pada bukunya yaitu bab pemerintahan mengenai tanggung jawab pemerintahan (kabinet) perihal tanggung jawab pemerintah Islam, pada dasarnya yang memilikinya adalah presiden (kepala pemerintahan) betapapun keadaannya. Dia punya hak untuk melakukan apa saja untuk kemudian menyerahkan penilaian perilakunya kepada masyarakat. Jika ia baik, rakyat wajib mendukungnya. Namun sebaliknya, jika ia tidak baik, maka rakyat harus meluruskannya.

Islam tidak melarang seorang presiden melimpahkan wewenang eksekutifnya kepada yang lain untuk mengemban tanggung jawab ini. Sebagaimana dalam pemerintahan Islam masa lalu dikenal dengan “*wizaratul tafwid*”(maksudnya kurang lebih sama dengan sistem

kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sekarang ini dan membolehkannya sepanjang tetap dalam kerangka menegakkan maslahat.⁷⁴

Hasan Al-Banna juga menuliskan “dulu umat bersatu dalam kata dengan berpegang teguh kepada tali agama, yakni akan keutamaan hukum-hukumnya, memelihara perintah Rasulullah saw, dan peringatan beliau untuk menjaga persatuan. Demikian pentingnya arti jamaah dan persatuan dibawah naungannya.

Sampai-sampai Rasul membenci siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَزْمٍ حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتَلَ فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ حَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بِرِهَا وَفَاجِرْهَا وَلَا يَتَحَشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لَذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ⁷⁵

Artinya : Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan menentang jamaah, kemudian ia meninggal, maka ia dalam keadaan mati jahiliyyah. Dan barangsiapa yang berperang dibawah bendera ashabiyah, marah karena ashabiyah, menyeru kepada ashabiyah, atau menghidupkan ashabiyah, kemudian ia terbunuh, maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah. Barangsiapa keluar dari umatku, mencela yang baik dan buruknya, tidak mau berhati-hati terhadap orang mukmin, dan tidak menepati janji maka dia bukan dari golonganku dan aku pun bagian darinya (HR.Abu Hurairah)

⁷⁴Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* (Solo:Era Intermedia,2008) hal.306

⁷⁵Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syara' Muslim*, Juz 12 (Beirut:Darul Khoir,1996 M), no.1848. hal.549

Hasan Al-Banna menerangkan tentang hak-hak dari pemerintahan Islam yang baru terlaksananya jika kewajibannya telah ditunaikan. Ini merupakan salah satu bukti pemahaman fiqih Imam Hasan al-Banna yang sangat cermat. Hasan al-Banna berkata: “Diantara hak-hak pemerintahan Islam adalah: *wala'* (loyalitas) serta sokongan baik dengan harta bahkan nyawa”.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa hak baru diterima setelah kewajiban ditunaikan. Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾
 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾
 ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾
 ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 58-59)

Ayat yang pertama menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan pemimpin terhadap dirinya, yaitu supaya ia berlaku adil dalam penyerahan wewenang dan jabatan tertentu pada orang yang tepat dan memang ahli di bidang tersebut serta kewajiban menegakkan keadilan antara dua pihak yang mengadukan permasalahan mereka kepadanya untuk diselesaikan secara hukum dengan adil.

Sedangkan ayat kedua mengidikasikasikan tentang hak-hak yang bakal diterima seorang pemimpin dari rakyatnya yaitu berupa loyalitas serta kewajiban rakyat untuk selalu menjalankan instruksinya selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁷⁶ Hasan Al-Banna menjelaskan karakter pemerintahan Islam sebagai berikut:

“Pemerintahan Islam adalah Pemerintahan yang para anggotanya orang-orang muslim, melaksanakan kewajiban, tidak bermaksiat secara terang-terangan, dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Tidak menggunakan orang-orang non muslim sepanjang hanya menduduki jabatan umum. Bentuk dan jenis pemerintahan tidak menjadi persoalan sepanjang sesuai dengan kaidah-kaidah umum pemerintahan Islam. Diantara sifat-sifat adalah rasa tanggung jawab, kasih sayang

⁷⁶Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Agenda Politik Dan Pemerintahan Islam* (Jakarta: Era Muslim, 2011) hal.96

kepada rakyat, bersikap adil sesama manusia, menahan diri dari harta rakyat dan menghemat penggunaannya. Apabila pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya, maka berilah nasehat dan bimbingan. Jika itu pun tidak berarti maka dicabutlah ketaatan dan kesetiaan kita lalu disingkirkan, karena tiada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah).”⁷⁷

Tiada seorang Rasul pun yang tidak mengharuskan kaumnya agar melaksanakan dua hal yaitu: takwa dan taat. Tanpa ketaatan, maka tidak ada jamaah, tidak ada gerakan, tidak ada sistem, tidak ada *keridhaan* Allah, tidak ada jihad, dan tidak ada tujuan yang dapat tercapai. Akan tetapi ketaatan tanpa yang sempurna tidak dapat terwujud tanpa ilmu dan *tsiqoh*. Oleh karena itu Hasan Al-Banna tidak menuntut ketaatan secara penuh kepada anggota yang masih berada pada tingkatan takrif. Keharusan taat secara penuh ini tidak realistis, bahwa pada tingkatan takrif kita dituntut untuk memperkenalkan anggota kepada jamaah agar ia mengenal dan percaya penuh. Jika ia telah mengenal dan percaya penuh, maka ia telah siap memasuki peringkat takwin untuk dibina dan diambil perannya nanti di peringkat *tanfidz*. Ketaatan di peringkat *mutlak*.⁷⁸

⁷⁷Said Hawwa, *Membina Angkatan Mujahid, Study Analisis Konsep Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Risalah Ta'lim* (Solo:Intermedia,2002) hal.63

⁷⁸*Ibid*, hal.172

B. Perbedaan Pendapat Antara Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna Mengenai Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin

Perbedaan pendapat antara Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna tentang Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin adalah :

1. Menurut Al-Mawardi. Jika Imam telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak rakyat, rakyat wajib mematuhi dan mendukung kebijaksanaannya. Jika kepala negara telah menjalankan hak-hak umat, lalu ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat itu kepala negara itu mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu : taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama ia tidak berubah keadaannya.

Perubahannya sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara ada dua hal yaitu : Kredibilitas pribadi rusak dan terjadi ketidaklengkapan anggota tubuh. Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan yang Fasik. Hal itu disebabkan dua macam yaitu ia mengikuti syahwatnya dan mengikuti syubhat.

Hal ini pertama berkaitan dengan perbuatan tubuh, yaitu dengan melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat, dan menurut hawa nafsunya. Ia adalah kefasikan yang menghalangi untuk menjabat kepala negara dan meneruskan jabatannya. Hal yang kedua adalah berhubungan

dengan akidah, yaitu ia melakukan takwil terhadap sesuatu masalah yang shubhat sehingga ia menghasilkan takwil yang menyalahi kebenaran. Terjadi ketidaklengkapan tubuh terbagi dalam tiga bagian yaitu: cacat indera, cacat organ tubuh, dan cacat tindakan.

2. Menurut Hasan Al-Banna, taat terbagi pada beberapa klasifikasi yang diukur dari sejumlah tahapan pengkaderan seorang anggota. Sehingga, berbeda tingkatan pengkaderan seseorang, maka berbeda pula tuntutan untuk taat kepadanya. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

Pertama, takrif. Pada tahap ini dakwah dilakukan dengan menyebarkan fikrah Islam di tengah masyarakat. Dakwah pada tahap ini bersifat umum. Ketaatan yang tanpa *reserve* pada tahapan ini tidaklah dituntut, bahkan tidak lazim. Tingkatannya seiring dengan kadar penghormatannya kepada sistem dan prinsip-prinsip umum Jamaah.

Kedua, Takwin. Pada tahapan ini dakwah ditegakkan dengan melakukan seleksi terhadap anasir positif untuk memikul beban jihad dan untuk menghimpun berbagai bagian yang ada. Slogan untuk kedua aspek ini adalah: ” perintah dan taat”, tanpa keraguan. Dakwah pada tahapan ini bersifat khusus. Ia tidak dapat dikerjakan oleh seseorang kecuali yang telah memiliki kesiapan secara benar untuk memikul beban jihad yang lama masanya dan berat tantangannya. Slogan utama dalam persiapan ini adalah : “totalitas ketaatan”.

Ketiga, Tanfidz. Dakwah dalam tahapan ini adalah jihad dengan tanpa kenal sikap plin-plan, kerja terus-menerus untuk menggapai tujuan akhir, dan siap menanggung segala cobaan yang tidak mungkin bersabar atasnya kecuali orang-orang yang tulus. Dakwah ini tidak mungkin meraih keberhasilan kecuali dengan “ketaatan yang total” juga.

Hasan Al-Banna mengatakan bahwa kewajiban rakyat untuk selalu menjalankan instruksi pemimpin selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila pemerintahan lalai melaksanakan kewajibannya, maka berilah nasehat dan bimbingan. Jika itu pun tidak berarti, maka dicabutlah ketaatan dan kesetiaan kita lalu disingkirkan, karena tiada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah).

Jadi perbedaan pendapat antara Imam Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna mengenai konsep Loyalitas atau ketaatan rakyat terhadap pemimpin adalah pertama, ada pada konsep Hasan Al-Banna mengenai klasifikasi ketaatan, sedangkan Al-Mawardi tidak menggunakannya. Kedua, Al-Mawardi mengatakan bahwa taat pada pemimpin selama tidak berubah keadaannya (kredibilitas pribadinya rusak dan terjadi ketidaklengkapan anggota tubuh), sedangkan Hasan Al-Banna memberi batasan taat pada pemimpin jika selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

C. Pendapat Masyarakat Desa Batang Nadenggan terhadap Hukum Loyalitas Rakyat Kepada Pemimpin

Untuk mendapatkan bagaimana pendapat masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang loyalitas rakyat kepada pemimpin, peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat.

Beberapa tokoh masyarakat yang diwawancara oleh peneliti adalah Ustadz Pangadilan Hasibuan yang merupakan *Malim Kappung* (Ustadz Kampung), Bapak Raja Inal Siregar yang merupakan Tokoh Adat, Bapak Muksin Siregar selaku Tokoh Masyarakat setempat, Sumardi Dongoran dan Arsyian Ramadhan Siregar yang merupakan perwakilan dari pemuda.

Sebagaimana wawancara, informan menjelaskan bahwa pemimpin harus ditaati selama ia jujur. Apabila pemimpin lalai dari tugasnya, maka yang dilakukan sebagai rakyat adalah menasehatinya. Ustadz Pangadilan Hasibuan mengatakan,

“Batasan taat kita boleh taat kepada Pemimpin itu adalah selama pemimpin itu jujur dan tetap melaksanakan kewajibannya maka kita sebagai masyarakat wajib patuh dan mendukungnya tetapi jika seorang pemimpin itu lalai dari tugasnya maka kita wajib menasehatinya dan memberinya bimbingan.”

Raja Inal Siregar mengatakan,

“Sebenarnya ketaatan itu wajib selama pemimpin tidak memerintahkan masyarakat berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Justru, saat pemimpin berbuat sesuatu yang melawan hukum, kita seharusnya menegur dan mengingatkannya bukan malah mendukungnya.”

Sementara itu, Muksin Siregar tidak menitik beratkan bahwa kejujuran pemimpin yang menjadi tolak ukur dalam menaatinya. Beliau lebih menekankan kepada tanggungjawab yang ditunaikan oleh pemimpin tersebut serta tidak berbuat dzalim kepada rakyatnya. Akan tetapi, beliau juga sepakat bahwa saat pemimpin sudah tidak amanah, maka rakyat hendaknya menasehati pemimpin tersebut untuk bersikap taat. Muksin Siregar mengatakan,

“Batasan Taat kita pada Pemimpin selama adalah dia masih melaksanakan tugas dan kewajibannya dan tidak dzhalim maka kita juga harus membantu melaksanakan tugas-tugasnya serta menasehati jika ia tidak sempurna melaksanakan tugasnya.”

Jika dilihat dua pendapat diatas, terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan terhadap pemimpin yang tidak adil adalah dengan menasehatinya. Artinya, dua pendapat tersebut lebih mengedepankan jalan yang *soft* dalam menyikapi ketidakadilan pemimpinnya. Berbeda Pangadilan dan Muksin Siregar, sikap yang mereka tunjukkan adalah apabila pemimpin tidak adil, maka bukan nasihat yang diberikan kepadanya, melainkan tidak layak untuk dipertahankan serta dicopot jabatannya. Sumardi mengatakan,

“Jika Pemimpin tidak bisa menjalankan Amanah atau Tugasnya dan berbuat kedzhaliman kepada masyarakatnya maka pemimpin yang seperti itu tidak wajib ditaati dan layak dipertahankan.”

Dan Arsan mengatakan,

“Jika seorang pemimpin ingkar terhadap janji yang telah dia katakan maka pemimpin itu tidak wajib dipatuhi dan harus dicopot jabatannya.”

Pendapat diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi daripada yang disampaikan oleh Hasan Al Banna. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Sikap masyarakat yang memberikan pengecualian syarat untuk taat kepada pemimpin, yaitu selama pemimpin tersebut menurut mereka amanah dan adil maka pemimpin wajib untuk ditaati. Sedangkan jika mereka tidak berlaku amanah dan tidak adil, maka tidak wajib untuk ditaati. Walaupun demikian, sikap menaseati pemimpin yang tidak adil adalah pendapat yang disampaikan juga oleh Hasan Al Banna. Imam Al Mawardi mengatakan,

“Jika Imam telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak rakyat, rakyat wajib mematuhi dan mendukung kebijaksanaannya. Jika kepala negara telah menjalankan hak-hak umat, lalu ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat itu kepala negara itu mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu : taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama ia tidak berubah keadaannya.”

Menurut Al Mawardi, pemimpin yang melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat, dan menurut hawa nafsunya. Itu adalah kefasikan yang menghalangi dirinya untuk menjabat kepala negara dan meneruskan jabatannya.

2. Pendapat masyarakat diatas, tidak memberikan perbedaan sikap terhadap lapisan masyarakat. Siapapun orangnya, maka seharusnya sikapnya sama. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Hasan Al Banna, bahwa ada kalanya seorang rakyat tidak memiliki pilihan kecuali ketaatan total, selama

pemimpin itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Menurut penulis, Al Mawardi juga bermaksud mengungkapkan hal serupa, bahwa tidak ada ketaatan kepada perintah maksiat. Perbedaannya adalah, bahwa Al Mawardi tidak hanya meletakkan maksiat sebagai tolak ukur akan tetapi juga kondisi lain seperti sikap tidak amanah, tidak adil bahkan dari kecacatan fisik seorang pemimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah yang setiap saat harus dipertanggung jawabkan.
2. Menurut Al Mawardi, jika kepala negara telah menjalankan hak-hak ummat, lalu ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat ini kepala negara mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu taat kepada pemerintahnya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama ia tidak berubah keadaannya. Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara ada dua hal, yaitu ketika kredibilitas pribadinya rusak dan ketika terjadi ketidaklengkapan anggota tubuh pemimpin tersebut.
3. Hasan al-Banna berkata: “Diantara hak-hak pemerintahan Islam adalah: *wala'* (loyalitas) serta sokongan baik dengan harta bahkan nyawa. Kewajiban rakyat untuk selalu menjalankan instruksi pemimpin selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila pemerintahan lalai melaksanakan kewajibannya, maka berilah nasehat dan bimbingan. Jika itu pun tidak berarti, maka dicabutlah ketaatan dan kesetiaan kita lalu disingkirkan, karena tiada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah).”

4. Perbedaan pendapat antara Imam Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna mengenai konsep Loyalitas atau ketaatan rakyat terhadap pemimpin adalah pertama, ada pada konsep Hasan Al-Banna mengenai klasifikasi ketaatan, sedangkan Al-Mawardi tidak menggunakannya. Kedua, Al-Mawardi mengatakan bahwa taat pada pemimpin selama tidak berubah keadaannya (kredibilitas pribadinya rusak dan terjadi ketidaklengkapan anggota tubuh), sedangkan Hasan Al-Banna memberi batasan taat pada pemimpin jika selama instruksi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
5. Masyarakat Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan cenderung mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi daripada yang disampaikan oleh Hasan Al Banna. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, Imam Al Mawardi mengatakan, “Jika Imam telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak rakyatnya, yaitu taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan”. *Kedua*, berbeda dengan yang disampaikan oleh Hasan Al Banna, bahwa ada kalanya seorang rakyat tidak memiliki pilihan kecuali ketaatan total. Selain itu, Al Mawardi juga tidak hanya meletakkan maksiat sebagai tolak ukur akan tetapi juga kondisi lain seperti sikap tidak amanah, tidak adil bahkan dari kecacatan fisik seorang pemimpin.

B. Saran

Loyalitas kepada pemimpin hendaknya diawali dengan proses pemilihan pemimpin berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh para ulama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aspinal, Edward. 2000. *Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LkiS.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- As-Suwaitan, Muhammad,Thariq dan Umar Basyarahil, Faishal. 2005. *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*,. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Jamil. 1992. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Aziz ,Abdul Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Assisi, Abbas. 2006. *Biografi Dakwah Hasan Al-Banna*, terj. Nandang Burhanuddin. Bandung:Harokatuna Publishing.
- Ahmad Isya, ‘Asyur. 2005. *Ceramah-Ceramah Hasan Al-Banna, Hadits Tsulatsa, Cet V. Solo:Era Intermedia*.
- Al-Banna, Hasan. *Memoar Hasan Al-Banna. Solo:Media Insani Press*.
- Al-Banna, Hasan. 2008. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo:Era Intermedia.
- Ghazali, Imam. *Al Tibr al- Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Ahmad dan Thalbah, Muhammad. 2005. *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik HAMKA*. Yogyakarta: UII Press.
- Haque, M. Atiqul. 2003. *100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia*. Bandung: Pictures.
- Hasan, Al-Banna. 198. *Konsep Pembaharuan Umat Islam*. Jakarta : Media Dakwah.
- Hawwa, Said. 2002. *Membina Angkatan Mujahid, Study Analisis Konsep Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Risalah Ta’lim*. Solo:Intermedia.
- Hawwa, Sai’d. dan Qutub, Sayyid. 2001. *Al-Wala’*. Jakarta: Al-I’tisom Cahaya Umat.

- Iqbal, Muhammad. 2001) *Fikih Siyasah; Kontektualisasi Dokterin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Islam, Eksiklopedi Tematis Dunia. 1998. *Pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Jundi, Dr. Anwar. 2006. *Biografi Hasan Al-Banna*. Jakarta: Mediasi Insani Publishing.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khaldun, Ibnu , 2010. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Khalik, Abdul dkk. 1999. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Khaliq, Abdul Farid. 2005. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khozin, Drs. Muhammad Dahlan. dan Sya'roni, Drs. Muhammad. 2012. *Teori Dan Gaya Kepemimpinan di Dunia*. Jombang: Multaza.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al Kitab al Imiah
- Al-Mawardi, Imam. 2014. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* edisi Indonesia. Jakarta: Qisti Press.
- Muhammad, Hussein. 2000. *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik*, Dalam Suedy (ed), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan.
- Mufid, Mohd. 2004. *Politik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Nasution, Husein Amin. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nur, Mufid dan Fuad, Nur. 2002. *Bedah Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nu'man, Farid. 1993. *Ikhwanul Muslimin Anugrah Allah yang Terdzholimi*. Depok: Pustaka Nauka.
- Prayitno, Irwan. 2002. *Al-Haq wal Bathil*. Bekasi: Pustaka Tarbiatuna.
- Qadir, Muhammad Abdul Abu Faris. 1999. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Robbani Pres.
- Qadir, Dr. Muhammad Abu Faris Abdul. 2011. *Agenda Politik Dan Pemerintahan Islam*. Jakarta: Era Muslim.

- Al-Quraibi, Ibrahim. 2012. *Tarikh Khulafa'*, terj. Faris Khairul Anam. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Quran, Tim Penterjemah. *al - Qur'an dan Terjemahnya*. 1412. Madinah: Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li al-Taba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- Richard, Michell Paul. 2002. *Masyarakat Al Ikhwanul Muslimin Gerakan Dakwah Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*. terj. Safrudin Edi Wibowo. Jakarta: Guana.
- Rusdji, Ali Muhammad. 2004. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ar-Raniry Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2000. *Api Sejarah*. Bandung: PT Salama dani Pustaka Semesta.
- Sadjzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Ash- Shiddiqy, T.M. Hasb. 1991. *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sadzjali, Munawwir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Yahya, Abu Zakariya ibn Nawawi Sharaf. 1996. *Al-Minhaj Fi Syara' Muslim, Juz 12*. Beirut: Darul Khoir.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2013. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jurnal:
- Mahmudah, Siti , "Rekonstruksi Syari'at Islam: Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 45 No. II.
- Brown, Perception of Student Misconduct, Perceived Respect for Teachers, and Support for Corporal Punishment Among School Teachers in South Korea: An exploratory case study, (Journal Educational Research for Policy and Practice, 2009).
- Diana, Rashda, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". Jurnal Tsaqafah. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Batang Gogar⁷⁹ pada tanggal 19 Nopember 1994, putri dari pasangan suami-isteri, Raja Inal Siregar dan Siti Azum Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Dusun Sungai Bondar⁸⁰ pada tahun 2007, tingkat SLTP di Madrasah Şanawiyah Shariful Hidayah Batang Gogar pada tahun 2010, dan tingkat SLTA di SMAN 1 Hutaimbaru Padang Lawas Utara pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2013 dan lulus tahun 2018 dengan nilai A pada Skripsinya dan IPK 3.61. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, antara lain:



1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN SU tahun 2014-2018 sebagai Staf Kebijakan Publik.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab sebagai Bendahara HMJ Periode 2016-2017.

Motto:

“Bagaimana Mungkin Engkau Luar Biasa, Sementara Kebiasaanmu Belum Luar Biasa.”

⁷⁹Sebuah dusun dari Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

⁸⁰Adalah salah satu dari dusun Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungi Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selata, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.